



ACCESS Phase II

Laporan Enam-Bulanan


Mei - Oktober 2009

www.access-indo.or.id
ACCESS

Disclaimer

Laporan ini menjelaskan tentang layanan yang disampaikan oleh IDSS Pty Ltd dan dilaksanakan oleh tim ACCESS Tahap II sesuai dengan Cakupan Layanan yang disetujui didalam kontrak 45746 diantara IDSS Pty Ltd dan AusAID. Laporan ini telah dipersiapkan atas nama dan secara khusus digunakan oleh AusAID karena diperlukan untuk kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan yang sedang berjalan. Laporan ini berlaku hanya dan dibuat dalam kaitannya dengan pemenuhan persetujuan diantara IDSS Pty Ltd dengan AusAID. IDSS Pty Ltd tidak bertanggung jawab terhadap berbagai penggunaan dan kepercayaan terhadap laporan ini oleh pihak ketiga manapun. Isi dari laporan ini dan rekomendasi yang dibuat mungkin akan digunakan seperlunya sesuai dengan kebutuhan Program.

Versi Bahasa Inggris adalah versi yang resmi.

DOCUMENT CONTROL					
					
G:\ACCESS Phase II\07. Plans-Reports\07.5. Six Monthly Reports to AusAID\6 month Rpt May-Oct09-NJF.doc					
Rev No.	Date	Revision Details	Author	QA	Approve
0	30/10/09	Final document for submission	NJF	CW	PGB

IDSS

Level 12, 60 Albert Road
South Melbourne, VIC, 3205
AUSTRALIA
Tel: 61 3 8683 1457
Fax: 61 3 8683 1599

ACCESS Phase II

Jl. Bet Ngandang 1, No.1 xx
Sanur, 80033
Bali
INDONESIA
Tel: 62 361 288 428
Fax: 62 361 287 509

Table of Contents

Executive Summary.....	1
1 Pendahuluan.....	7
2 Tujuan Program	9
2.1 Ringkasan Tujuan	9
2.2 Capaian berdasarkan Tujuan	9
2.2.1 Tujuan 1.....	9
2.2.2 Tujuan 2.....	11
Tujuan 3.....	12
2.2.3 Tujuan 4.....	14
3 Perkembangan Pelaksanaan Terhadap Lima Functional Area ACCESS Tahap II 16	
4 Functional Area 1: Menyediakan sumberdaya dan mengelola Program	17
4.1 Functional Area 2: Berinteraksi dinamis dengan Masyarakat Sipil dan Pemerintah lokal berdasar pada nilai-nilai dan prinsip bersama.	17
4.2 Functional Area 3: membangun kapasitas dari intitusi-institusi lokal untuk memenuhi fungsi dalam membangun demokrasi yang terdesentralisasi.	19
4.3 Functional Area 4: Mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya- upaya pengembangan yang dilakukan secara mandiri.	21
4.4 Functional Area 5: Mendorong pembelajaran yang berkelanjutan dan perubahan kebijakan dan praktek baik internal maupun eksternal.	22
5 Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran	26
5.1 Monitoring dan Evaluasi	26
5.2 Pembelajaran yang Diambil dari Pelaksanaan Program	27
6 Keberlanjutan.....	28
7 Isu-isu Lintas Program (Cross-cutting Issues).....	31
7.1 Kesetaraan Gender	31
7.2 Lingkungan Hidup	32
7.3 Anti Korupsi	33
7.4 Kemitraan	35
8 Manajemen Resiko	36
9 Manajemen Program	37
9.1 Pengisian Staf Program	38
9.2 Manajemen Dana Hibah.....	38
9.2.1 Grants Processing.....	38
9.2.2 Pembelanjaan Dana Hibah.....	39

List of Tables

Tabel 1: Kontribusi Pemerintah daerah terhadap PGA Mitra CSO ACCESS	12
Tabel 2: Hasil Tender CB ACCESS.....	20
Table 3: Faktor Yang Mendukung Keberlanjutan Program ACCESS Phase II.....	28
Tabel 3: Faktor Yang Mendukung Keberlanjutan Program ACCESS Phase II.....	29
Tabel 4: Peserta pada Pelatihan Keuangan ACCSYS.....	34
Tabel 5: Resiko yang diidentifikasi Mei-Oktober 2009.....	36
Tabel 6: PGA yang dikeluarkan untuk Masa Mei-Oktober 2009	39

List of Figures

Gambar 1: Kerangka Kerja dan Struktur ACCESS.....	8
Gambar 2: Dana Hibah Inovatif yang Diterbitkan bulan Mei-Oktober	24
Gambar 3: Proses Dana Hibah untuk masa Mai-Oktober 2009.....	39
Gambar 4: Proses Dana Hibah untuk Period Project hingga Saat ini.....	39
Gambar 5 Anggaran versus Pembelanjaan	40

Appendices

Appendix 1: Glossary of Terms	Appendix 1 page 1
Appendix 2: Progress Monitoring Matrix	Appendix 2 page 1
Appendix 3: Grant Allocation by District and Grant Type.....	Appendix 3 page 1
Appendix 4: Six monthly Funding Estimates.....	Appendix 4 page 1
Appendix 5: Documents Produced this Reporting Period	Appendix 5 page1
Appendix 6: PGAs Issued this Reporting Period.....	Appendix 6 page 1

Abbreviations and Acronyms

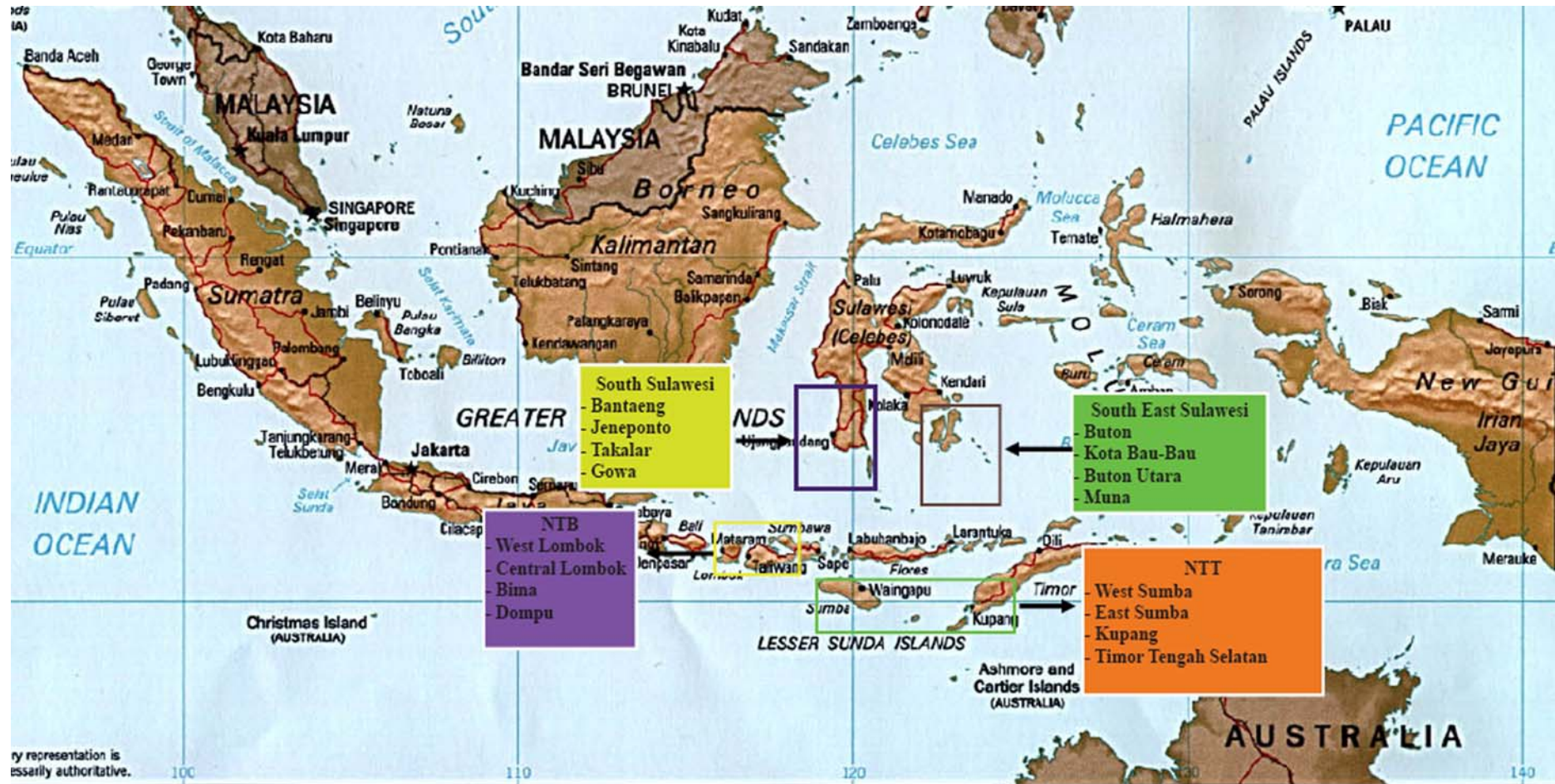
ACCESS	Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme
ADD	<i>Alokasi Dana Desa</i> (Village Budget Allocation)
AI	Appreciative Inquiry
AIPD	Australian Indonesian Partnership for Decentralisation
AIP-MNH	Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health
ANTARA	Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy
APBD	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i> (District Income and Expenditure Budget)
APBN	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional</i> (National Income and Expenditure Budget)
APY	Annual Plan Year
AUD	Australian Dollar
AusAID	Australian Agency for International Development
Bappenas	Ministry of National Development Planning
BPM	<i>Badan Pemberdayaan Masyarakat</i> (Community Empowerment Body)
BPMPD	<i>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan</i> (Community and Government Empowerment Body)
<i>Desa</i>	Village
BUMDes	<i>Badan Usaha Milik Desa</i> (Village Owned Enterprises)
CB	Capacity Building
CDST	Community Development Snapshot
CE	Community Engagement
CLAPP	Community Led Assessment and Planning Process
CLM	Coordination and Learning Meeting
CPS	Country Program Strategy
CS	Civil Society
CSI	Civil Society Index
CSO	Civil Society Organisation
DCEP	District Citizen Engagement Plan
DPRD	<i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i> (Local Legislative Council)
DSC	District Stakeholder Committee
DSF	Decentralisation Support Facility
EMP	Environmental Management Plan
<i>Forum KTI</i>	<i>Forum Kawasan Timor Indonesia</i> (Eastern Indonesia Forum)
FMM	Field Management Manual
GOA	Government of Australia
GOI	Government of the Republic of Indonesia
GSI	Gender and Social Inclusion
<i>Kabupaten</i>	District
<i>Korprov</i>	<i>Koordinator Provinsi</i> (Provincial Coordinator)
LDG	Local Democratic Governance
LG	Local Government
LGSP	Local Governance Support Program
M&E	Monitoring and Evaluation
MEL	Monitoring, Evaluation and Learning

MIS	Management Information System
MOHA	Ministry of Home Affairs
MKPPDes	<i>Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Desa</i> (Consolidation Matrix for Village Planning and Budgeting)
MRG	Monitoring Review Group
Musrenbang	<i>Musyawahar Perencanaan Pembangunan</i> (Development Planning Process)
NGO	Non-Governmental Organisation
ODI	Overseas Development Institute
ODST	Organisational Development Snapshot Tool
OHS	Occupational Health and Safety
OM	Outcome Mapping
Oxfam GB	Oxfam Great Britain
P2K	<i>Program Pengembangan Kecamatan</i> (Sub-District Development Program)
P3B	Pro-Poor Planning and Budgeting
PABAM	<i>Pendidikan Alternatif Anak dan Masyarakat</i> (Alternative Learning for Children and Adults)
PAMELS	Participatory Monitoring, Evaluation and Learning System
PC	Program Coordinator
PCC	Program Coordination Committee
PD	Program Director
PDD	Project Design Document
<i>Pemda</i>	<i>Pemerintah Daerah</i> (District Government)
PGA	Project Grant Agreement
PKK	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</i> (Family Empowerment and Prosperity)
PMD	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i> (Village and Community Empowerment) – Directorate General within Ministry of Home Affairs
PNPM	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat</i> (National Community Empowerment Program)
Pokja AMPL	<i>Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan</i> (Working Group for Water, Health and Environment)
Rp.	Rupiah
<i>RPJMDes</i>	<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa</i> (Village Mid-Term Development Plan)
SADI	Small-holder Agribusiness Development Initiative
SAPA	Strategic Alliance for Poverty Alleviation
SKPD	<i>Satuan Kerja Perangkat Daerah</i> (Technical Units within each district)
SOfeI	Support Office for Eastern Indonesia
SOS	Scope of Services
SS	Support Services
STA	Short Term Advisor
STO	Senior Technical Officer
TA	Technical Assistance
TAT	Technical Advisory Team
TKPKD	<i>Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</i> (District Coordinating Team for Poverty Alleviation)

TOF
TOR
TOT
UNDP

Training of Facilitators
Terms of Reference
Training of Trainers
United Nations Development Program

ACCESS Phase II Wilayah Kerja



Ringkasan Executive

Selama masa pelaporan Mei hingga Oktober 2009, ACCESS Tahap II memiliki capaian-capaian dibawah ini:

- **Pemerintah Australia (GOA) dan Pemerintah Indonesia (GOI) menetapkan bahwa ACCESS Tahap II berjalan dengan baik.**

Misi Monitoring Review Group (MRG) kedua yang ditunjuk oleh AusAID, terdiri dari GOI (tingkat nasional dan propinsi), AusAID dan seorang ahli M&E dari pihak luar yang ditugaskan oleh AusAID menemukan bahwa, *“ACCESS Tahap II secara program telah berada di jalur yang semestinya, dan bahwa hubungan-hubungan penting bersifat kondusif untuk memebantu perkembangan capaian-capaian pengembangan yang bernilai. Khususnya terdapat hubungan internal yang kuat, dan perluasan interaksi dinamis dengan wakil Pemerintah daerah.”*¹

Pertemuan ketiga Program Coordinating Committee (PCC) antara Departemen Dalam Negeri (MOHA) dan AusAID menghasilkan arahan Program dan upaya-upaya Program untuk membantu Pemerintah Daerah menanggapi kebutuhan bagi tata pemerintahan yang lebih baik dengan cara memperkaya proses dan menciptakan mekanisme bagi interaksi diantara Civil Society Organisations (CSO) dan Pemerintah Daerah. MOHA juga memperhatikan upaya-upaya kerjasama ACCESS yang sangat baik dengan program lainnya, seperti halnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan PCC secara penuh mengesahkan Rencana Tahunan Tahun ke 2.

ACCESS Tahap II berjalan dengan baik didalam Contractor Performance Assessment (Penilaian Kinerja Kontraktor - CPA) AusAID, dengan beberapa kriteria prestasi kritis, termasuk diantaranya pendekatan, menerima klasifikasi 'best practice' (praktek yang paling baik). CPA menyimpulkan bahwa *“AusAID terus menerima tanggapan balik yang positif dari para stakeholder Program sebagai hasil dari komunikasi yang berkualitas baik dan hubungan yang telah dibangun oleh Program”*.

- **ACCESS Tahap II mulai mengangkat Program, dan profil AusAID di tingkat internasional.**

ACCESS Tahap II secara sengaja menyasar masyarakat pengembangan yang lebih luas dengan cara mengambil bagian didalam konferensi, evaluasi dan penelitian baik untuk memberitahukan perkembangan Program didalam menggunakan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektifitas pengembangan, dan untuk mengangkat Program dan profil AusAID ditingkat internasional:

Sebagai contoh:

- Organising Committee dari Konferensi World Appreciative Inquiry (AI) telah meminta ACCESS menyampaikan sebuah makalah dan memfasilitasi sebuah lokakarya pada konferensi mereka yang akan datang di Nepal untuk berbagi pengalaman dalam penggunaan AI di pengembangan tata pemerintahan yang demokratis ditingkat kabupaten. Pengalaman ACCESS dianggap penting karena melampaui perencanaan pengembangan kedalam kenyataan tata pemerintahan – menciptakan sebuah ruang positif bagi masyarakat sipil (CS) dan pemerintah untuk bekerja bersama mengenai isu-isu penting.
- CIVICUS, the World Alliance for Citizen Participation, mengakui pendekatan inovatif ACCESS didalam melaksanakan Civil Society Index (CSI) ditingkat kabupaten – di Negara lain biasanya dilakukan pada tingkat nasional – sebagai sebuah alat yang efektif bagi interaksi dinamis, analisa dan aksi

¹ Crawford, P, June 2009, “ACCESS Phase II MRG Mission 2 Report”, hal 4

ditingkat kabupaten. Sebagai hasilnya, CIVICUS telah memilih Indonesia sebagai salah satu dari enam Negara untuk disertakan didalam Evaluasi Dampak CSI.

- ACCESS Tahap II, dalam kerjasamanya dengan VECO-Belgia menerima dana hibah ODI bagi proyek penelitian gabungan disebut "*Contextualising Outcome Mapping in Indonesia*", pertama kalinya di daerah ini. Sebuah OM Resource Kit berdasarkan pada penelitian saat ini sedang diselesaikan.
- Sebuah studi UNDP akhir-akhir ini tentang 'Respon Terhadap Gender dari Upaya Peningkatan Kapasitas untuk Lokalisasi MDG di Indonesia' menggunakan ACCESS sebagai salah satu tiga studi kasusnya².

Pengakuan tersebut membawa kesempatan yang penting bagi ACCESS Tahap II dan AusAID untuk mempengaruhi diskursus internasional mengenai topik-topik tata pemerintahan. Selain itu juga menyediakan sebuah kesempatan untuk pokok-pokok komitmen ACCESS terhadap dan praktek tentang, menyediakan ruang bagi inovasi dan kreatifitas didalam mengembangkan pendekatan dan metodologi pengembangan yang lebih efektif.

- **Lembaga donor mempertimbangkan pendekatan-pendekatan ACCESS.**

Lembaga donor mempertimbangkan pendekatan dan alat-alat ACCESS dan menggunakannya didalam program mereka dan didalam mengembangkan alat dan kebijakan mereka sendiri didalam dan diluar wilayah sasaran ACCESS Tahap II.

Sebagai contoh:

- Fourth Eastern Indonesia Forum (Forum Kawasan Timur Indonesia - KTI) dalam 'Collaboration for Development Effectiveness' yang diorganisir oleh SOfEI memilih seorang mitra ACCESS Tahap II dari NTB untuk memperkenalkan pendekatan pendidikan anak dan dewasa yang dipimpin oleh masyarakat sebagai salah satu dari 12 'Perilaku Pintar di Kawasan Timur Indonesia'.
 - NZAID mengundang ACCESS Tahap II untuk berbagi pengalaman tentang bantuan yang efektif kepada CSO lokal dalam berinteraksi dinamis dengan Pemerintah daerah sebagai bagian pengarah ulang (dan perluasan) NZAID portofolio hingga sekitar 20 million dollars di tahun 2012.
 - Asia Foundation telah mengambil alat Organisational Development Snapshot Tool (ODST) dan Organisational Capacity Assessment (OCA) ACCESS dan menggabungkannya kedalam alat tunggal yang disebut 'Organisational Capacity and Performance Assessment Tool' (OCPAT), dimana sedang digunakan didalam menilai mitra potensial di NTB, NTT, Jawa, Sulawesi dan propinsi lainnya.
- **GOI mengakui bahwa ACCESS Tahap II menyumbang terhadap pengisian tempat didalam perencanaan dan penganggaran desa, dan memperkaya prosedur pemerintah dengan cara merancang proses yang partisipatif yang menyatukan upaya-upaya perencanaan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah.**

Sebagai contoh:

- Bappenas mengundang ACCESS Tahap II untuk berbagi pengalaman mereka tentang kerjasama dengan pemerintah kabupaten didalam Lokakarya Nasional: 'Pembelajaran mengenai P3B dan Perencanaan Partisipatif'.
- PNPM di sebagian besar kabupaten sasaran ACCESS Tahap II mengakui pendekatan yang dipimpin oleh masyarakat dari ACCESS didalam proses perencanaan dan penilaian yang partisipatif dan membantu arah menuju

² Laporan ini akan dipublikasikan segera.

penyatuan pendekatan. PNPM telah meminta bantuan dari ACCESS dan mitra CSO untuk meningkatkan proses PNPM sendiri didalam menyasar kaum perempuan dan didalam meningkatkan fasilitasi masyarakat.

- PNPM Mandiri Support Facility (PSF) dari World Bank telah meminta Program Director ACCESS Tahap II untuk menjadi salah satu orang yang mereview Program Pedesaan PNPM 2010, sebuah program yang awalnya disetujui dengan anggaran \$US785 million.
 - AusAID/ACCESS dan PSF mengakui potensi Program untuk menyumbang peningkatan PNPM, khususnya diwilayah berbagi pengalaman perilaku yang baik didalam fasilitasi desa, pengembangan kapasitas (CB), Gender dan Social Inclusion (GSI), penilaian atas kemiskinan dan pendekatan ACCESS terhadap proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). PSF melihat potensi atas penggunaan sejumlah bantuan AusAID yang tidak dialokasikan bagi PNPM untuk mendanai kegiatan yang memperluas pengalaman ACCESS hingga kabupaten lainnya diluar wilayah sasaran ACCESS Tahap II.
- **ACCESS secara efektif memperluas (scaling-up) dampak dari pendekatannya pada perencanaan dan penganggaran desa yang dipimpin oleh masyarakat.**

ACCESS Tahap II telah membuat kemajuan yang signifikan didalam mempengaruhi pemerintah kabupaten, propinsi dan nasional baik didalam maupun diluar wilayah sasaran dengan pendekatan inovatifnya didalam membantu pelaksanaan peraturan pemerintah (Depdagri 66/2007) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Perencanaan Desa yang Partisipatif (RPJMDes) dan peraturan pemerinath 7/2007 mengenai (*KPM – Kader Pembangunan Masyarakat*).

Dengan memastikan pelaksanaan yang efektif dari dua keputusan tersebut, Pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia dan juga rencana pembangunan jangka menengah lima tahun untuk memastikan program berpihak pada kaum miskin dan pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang adil. Pendekatan ACCESS telah mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dari Pemerintah daerah dan telah meluas hingga wilayah diluar 16 kabupaten sasaran ACCESS tahap II. Sebagai contoh selama masa pelaporan ini:

- Sebuah utusan dari Pemerintah Propinsi Gorontalo, dalam kerjasamanya dengan JICA-Proyek Peningkatan Kapasitas (Capacity Development Project), mengunjungi Kabupaten Jeneponto untuk belajar mengenai perencanaan desa yang partisipatif dan pemetaan kemiskinan yang partisipatif sebagai bagian dari kampanye Pemerintah Propinsi agar setiap desa membuat RPJMDes, dan mampu untuk memastikan bahwa program pengurangan kemiskinan menyasar kelompok-kelompok yang terpinggirkan didalam masyarakat. Pemerintah Propinsi Gorontalo telah memutuskan untuk mencoba melaksanakan pendekatan ACCESS paling tidak di satu kabupaten/kota.
- Di Sumba, dua kabupaten (Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) telah mendekati MOHA dan ACCESS Tahap II guna memastikan Bantuan Tehnis dari ACCESS Tahap II untuk melatih fasilitator bagi pemetaan kemiskinan, perencanaan dan penganggaran partisipatif dan pembuatan RPJMDes. Permintaan ini didukung oleh Drs. Yohan Loban, M. Si, Kabid Pemerintahan Desa BPMD di propinsi NTT: *'Meskipun Pemerintah telah memiliki 'P3MD Plus', saya berharap dan saya akan mendukung bahwa pembuatan RPJMDes di seluruh desa di empat kabupaten di Sumba dapat menggunakan pengalaman dan pendekatan yang telah terbukti oleh ACCESS di sejumlah desa di Sumba'*.

- Selama lokakarya Bappenas tentang P3B, sejumlah Pemerintah daerah, sebagai contoh Pemerintah daerah Bone mengekspresikan ketertarikan untuk mengunjungi kabupaten Jeneponto untuk belajar dari pengalaman mereka didalam penilaian kemiskinan partisipatif dan perencanaan dan penganggaran desa yang dipimpin oleh masyarakat.
 - Program Labsite PMD tentang perencanaan dan penganggaran partisipatif di Lombok Tengah secara formal telah mengambil prinsip dan nilai-nilai ACCESS, dan proses CLAPP-GSI yang didukung oleh ACCESS didalam Panduan Operasional Tehnis.
- **Pemerintah Kabupaten dan Propinsi merasa yakin atas kegunaan RPJMDes dan telah mulai mengalokasikan dana untuk pelaksanaannya.**
Di delapan kabupaten lama ACCESS Tahap II dimana sejumlah desa sebelumnya telah membuat atau sedang membuat RPJMDes dibantu oleh tim dari ACCESS, terbukti bahwa Pemerintah daerah sangat tanggap dan memastikan pelaksanaan RPJMDes ini melalui: alokasi dana dari program pengurangan kemiskinan kabupaten; dengan cara meningkatkan anggaran ADD; dan dengan memperingatkan SKPD untuk mengenal sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran.
 - **ACCESS Tahap II dan mitra CSOnya semakin dikenal oleh pemerintah kabupaten atau propinsi sebagai pihak yang mampu untuk meningkatkan interaksi dinamis diantara masyarakat sipil (CS) dan pemerintah dan membantu keduanya yaitu sisi kebutuhan dan sisi suplai dari tata pemerintahan demokratis yang lebih baik dan penyampaian pelayanan yang lebih baik.**
Contoh masa pelaporan ini diantaranya:
 - Ketertarikan Pemerintah Propinsi NTB didalam pendekatan yang dipimpin oleh masyarakat terhadap pendidikan anak dan dewasa yang sedang dipromosikan oleh salah satu mitra ACCESS di NTB. Kegiatan ini muncul dari pengembangan rencana desa selama ACCESS Tahap I tetapi sejak saat itu terus berlanjut. Kunjungan akhir-akhir ini dari Gubernur NTB menyatakan komitmen dari Pemerintah Propinsi dan kelompok lintas departemen dari para ahli propinsi dibidang Pendidikan/Pendidikan Alternatif yang dipimpin oleh Bp Sudaryanto, MA, untuk melihat kedalam kelebihan komparatif tentang pendekatan yang dipimpin oleh masyarakat dibandingkan dengan sistem lainnya bagi kemungkinan adopsi di strategi alpabetisasi propinsi. ACCESS Tahap II dan mitranya, SANTAI, telah diminta untuk mendokumentasikan pengalaman dan metodologi berbasis masyarakat/berkelanjutan didalam program PABAM – *Pendidikan Alternatif Anak dan Masyarakat*.
 - Permintaan dari Pemerintah Kabupaten Dompu kepada ACCESS untuk membantu pembuatan kerangka kerja M&E mereka mengenai pendidikan dan penyampaian layanan kesehatan gratis.
 - Di NTT, staf ACCESS diundang untuk berpartisipasi didalam sebuah lokakarya Propinsi untuk perencanaan dan manajemen desa.
 - Di Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan, staf ACCESS diundang untuk berkontribusi didalam diskusi tentang Rencana Aksi Strategis bagi Pengurangan Kemiskinan dimana pemerintah local mengakui nilai-nilai metodologi partisipatif ACCESS (CLAPP+++)¹ untuk data yang dihasilkan secara lokal dan kebutuhan untuk membangun persepsi yang sama tentang indikator kemiskinan diantara berbagai stakeholder.

- **Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk mendanai pelaksanaan sejumlah rencana aksi mitra CSO ACCESS yang dihasilkan dari Lokakarya District Citizen Engagement Plan (DCEP).**

Di seluruh kabupaten sasaran ACCESS, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang tegas terhadap proses ACCESS dan siap mendanai pelaksanaan sejumlah rencana aksi yang dihasilkan dari lokakarya DCEP melalui mitra CSO local ACCESS melaksanakan rencana ini.

Sebagai contoh:

- Di delapan kabupaten lama, daya tanggap Pemerintah daerah terhadap pengembangan berdasarkan kebutuhan ditunjukkan oleh alokasi miliaran rupiah di anggaran APBD 2010 dan 2011 mereka sebagai kontribusi terhadap pelaksanaan proyek oleh mitra CSO local ACCESS bertujuan untuk tata pemerintahan yang meningkat. Lebih dari 2.5 miliar rupiah telah disiapkan oleh Pemerintah daerah untuk tahun pertama pelaksanaan. Pemerintah Lombok Tengah, berdasarkan pada keterlibatannya didalam proses penilaian, membantu salah satu mitra CSO local ACCESS, Jarpuk, untuk akses pendanaan bagi kredit kecil bagi anggotanya. Di Buton, pemerintah menyiratkan keinginannya untuk menyumbang pada program Pelintas didalam perencanaan dan penganggaran masyarakat dan kepada Prima untuk programnya dalam pelayanan Pendidikan.
- Di delapan kabupaten baru, seluruh Pemerintah daerah telah menyatakan komitmen mereka untuk bekerja dengan ACCESS Tahap II dan siap dengan dukungan APBD entah itu berwujud keuangan atau program, terfokus pada pengurangan kemiskinan melalui tata pemerintahan demokratis yang meningkat dengan cara memastikan interaksi dan kerjasama CS yang lebih kuat dengan pemerintah. Di sebagian besar Perjanjian Tehnis kabupaten mengatur tentang fungsi manajemen dan koordinasi antara Pemerintah daerah dan ACCESS siap untuk ditandatangani dan kontribusinya telah disebutkan.

- **ACCESS secara sukses menggunakan Outcome Mapping (OM) sebagai kerangka kerja terhadap pendekatan ACCESS, dan akibatnya para stakeholder menunjukkan perubahan didalam perilaku terkait dengan interaksi dinamis dengan pihak lain.**

Telah terbukti sukses penggunaan OM ACCESS, dimana telah membantu mitra CSO ACCESS dan Pemerintah daerah mengenal dan menjelaskan hubungan diantara para pelaku penting, dan diarahkan menuju perubahan dalam perilaku para pelaku penting. Perubahan dalam perilaku menjadi bukti baik di stakeholder pemerintah maupun warga dan pengakuan dan penerimaan bahwa terdapat nilai dalam interaksi dinamis yang lebih dekat dan transparan. Perubahan perilaku ini dibuktikan oleh kontribusi dana oleh Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan proyek proposal CSO mitra. Faktanya bahwa Pemerintah daerah daya tanggapnya meningkat terhadap kebutuhan warga, dan Pemerintah daerah dan kelompok-kelompok CS semakin terlibat dan memiliki komitmen terhadap agenda pengembangan kabupaten.

- **Manajemen ACCESS Tahap II dalam penyampaian Program telah berada pada jalurnya.**

Selama masa pelaporan ini, 29 proposal telah diterima dan disetujui, dan 29 PGA telah dibuat. Dari 29 PGA yang telah dibuat tersebut, 22 telah ditandatangani oleh mitra. Hingga hari ini ACCESS telah membuat 66 PGA dengan 27% dari total dana hibah telah dialokasikan. Masa pelaporan ini akan melihat mitra CSO ACCESS bekerja di 317 desa, dengan 46 BUM Des, 27 kelompok pengguna air, sembilan kelompok ekonomi desa, 71 pusat masyarakat, empat kelompok

pemuda dan 20 asosiasi lingkungan. Di 120 desa lainnya, akan diadakan proses Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

1 Pendahuluan

Strategi Interaksi Dinamis AusAID secara umum bagi perubahan Tata Pemerintahan Sub-nasional akhir-akhir ini telah dirancang dan kerangka kerja operasional terfokus pada tiga wilayah utama, diantaranya:

- Penguatan system tata pemerintahan utama dan mendorong manajemen keuangan yang lebih efektif dan transparan;
- Meningkatkan penyampaian layanan, khususnya tetapi tidak hanya melalui jalur supplier agen, dengan tekanan khusus pada pelayanan yang mengurangi kemiskinan; dan
- Menyediakan cara agar para pemakai dapat mengartikulasikan diri dan mengawasi layanan pengembangan pemerintah.

Strategi ini disampaikan pada komitmen [Australia Indonesia Partnership Country Strategy 2008-2013](#) (AIPCS) untuk secara strategis mendukung pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan dan disaat yang sama menekankan interaksi dinamis yang lebih dekat dengan rekanan pemerintah dan stakeholder lainnya serta tema AIPCS tentang (i) pertumbuhan yang inklusif; (ii) transparansi dan akuntabilitas didalam tata pemerintahan; (iii) pencapaian Millennium Development Goal (MDG) dan, (iv) manajemen sumber daya yang berkelanjutan.

Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II secara penuh mendukung Strategi Interaksi Dinamis AusAID baik dari sisi supply maupun sisi kebutuhan. ACCESS Tahap II memastikan bahwa Pemerintah daerah terlibat didalam proses pengembangan guna meningkatkan system dan prosedur mereka dan bahwa mereka memiliki akses terhadap metodologi dan perilaku pintar yang menguatkan system dan proses yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan warga dan pasar.Lokal Pada sisi kebutuhan, ACCESS Tahap II bersama dengan mitra CSO lokal, bekerja bersama warga dan kelompok warga dan CSO lainnya untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk mampu berpartisipasi secara efektif didalam proses demokratis. Dengan melakukan hal ini, ACCESS mendukung pengembangan dari konstituensi yang, dan bertindak, bertanggung jawab dan berinteraksi secara dinamis dan berinteraksi didalam sebuah dialog yang konstruktif bersama pemerinah untuk meningkatkan upaya-upaya pembangunan local. Hal ini membuka kemungkinan bagi partisipasi penuh pemerintah dan warga didalam manajemen yang kolaboratif mengenai urusan Negara ditingkat lokal.

Kerangka kerja struktur dan strategis Program disampaikan didalam Gambar 1. ACCESS Tahap II terfokus pada:

- Target kemiskinan yang lebih baik dan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dari desa ke tingkat kabupaten;
- Penyampaian layanan masyarakat yang lebih baik melalui menguatkan kader desa dan meningkatkan mekanisme umpan balik;
- Manajemen partisipatif terhadap sumber daya alam demi tata pemerintahan hutan dan sumber daya alam yang lebih baik; dan
- Pengembangan ekonomi lokal demi upaya pendapatan yang lebih baik dan peningkatan pendapatan melalui Koperasi dan Unit Usaha Desa Lokal.

Laporan enam bulanan ini menyampaikan perkembangan hingga saat ini untuk masa pelaporan Mei hingga Oktober 2009 terhadap Tujuan Program dan lima functional areas seperti yang dijelaskan didalam Cakupan Layanan (SOS).

Gambar 1: Kerangka Kerja dan Struktur ACCESS



2 Tujuan Program

2.1 Ringkasan Tujuan

ACCESS Tahap II bertujuan untuk menyumbang perubahan dimana akan memberdayakan warga dan organisasinya untuk berinteraksi dinamis dengan Pemerintah daerah untuk meningkatkan dampak pembangunan lokal di 16 kabupaten di Kawasan timur Indonesia. Program memandang untuk menyumbang melalui tujuan-tujuan dibawah ini:

1. CSO mitra menggunakan nilai-nilai pendekatan yang partisipatif dan inklusif untuk menguatkan kapasitas dan rasa percaya diri warga demi tata pemerintahan lokal yang demokratis.
2. CSO mitra secara rutin bekerjasama antara satu dengan yang lain didalam meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
3. CSO mitra secara rutin berinteraksi dinamis dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial dan penyampaian pelayanan yang berpihak pada kaum miskin.
4. Program pemerintah dan program lembaga donor mempertimbangkan pembelajaran dan contoh-contoh perilaku yang baik dari ACCESS Tahap II.

2.2 Capaian berdasarkan Tujuan

Bab dibawah ini menjelaskan perkembangan dihadapkan pada tujuan Program selama masa pelaporan Mei hingga Oktober 2009.

2.2.1 Tujuan 1

OMS mitra menggunakan pendekatan yang partisipatif, inklusif dan berdasarkan nilai-nilai demokratis untuk memperkuat kapasitas dan meningkatnya kepercayaan diri warga dalam pemerintahan lokal yang demokratis.

ACCESS Tahap II membuat perkembangan yang terus-menerus dan penting terhadap capaian dari Tujuan 1. Di Kabupaten lama, 23 CSO mitra telah menerapkan pendekatan partisipatoris yang melibatkan kurang lebih 2,644 (1,179 perempuan dan 1,465 laki-laki) anggota masyarakat didalam melaksanakan perencanaan dan penilaian social bagi proyek proposal mereka. Terdapat apresiasi dengan suara bulat diantara mitra bahwa terfokus pada perubahan perilaku (yang dipromosikan oleh ACCESS Tahap II dan digunakan didalam Kerangka kerja OM) telah sesuai dan sangat membantu mengkonseptualisasikan perubahan yang

“Pada saat saya terlibat secara langsung didalam penilaian sosial yang diadakan oleh YCM dan KOPPESDA, saya sangat terkejut dan senang melihat perempuan desa dengan berani berbicara dan menjadi kritis. Mereka bicara tentang hak-hak dasar mereka. Saya sangat terkesan dengan proses dan cara fasilitator menyediakan kesempatan dan memotivasi perempuan untuk berbicara.” Bapak Umbu Maramba Memang. Camat Nggaha Ori Angu

dikehendaki mengenai tata pemerintahan lokal yang demokratis.

ACCESS Tahap II menekankan pada penggunaan pendekatan “berbasis-kekuatan”, seperti yang ditunjukkan didalam wawancara apresiatif, District Citizen Engagement

Plan (DCEP) dan pemetaan aset didalam penilaian yang dilaksanakan oleh CSO mitra, telah membantu mitra didalam menciptakan rasa percaya diri baru diantara semua warga yang terlibat.



Aleta Baun, berbicara pada seminar Tata Pemerintahan Lokal Yang Demokratis di Kupang

Di delapan kabupaten baru, dalam persiapan untuk pertemuan DCEP (agar dilaksanakan selama masa pelaporan berikutnya), pertemuan, lokakarya, seminar yang difasilitasi oleh ACCESS, telah dilaksanakan dengan partisipasi dari para pelajar, petani, forum perempuan dan forum tokoh desa serta LSM untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai isu-isu tata pemerintahan lokal yang demokratis dan aplikasinya ditingkat masyarakat.

Delapan lokakarya CSI Index telah dilaksanakan di delapan kabupaten baru dengan 325 peserta (157 laki-laki dan 168 perempuan) dan berlanjut meneruskan diskusi mengenai peran CSO didalam mempromosikan tata pemerintahan lokal yang demokratis di seluruh kabupaten diantara munculnya District Stakeholders Committees (DSC) - (untuk diskusi lebih lanjut mengenai hasil lokakarya CSI lihat bab 3.2) Wawancara apresiatif telah dilaksanakan dengan lebih dari 300 stakeholder kunci di delapan kabupaten baru, dan wawancara ini telah mengenalkan pendekatan berbasis-kekuatan dan proses DCEP telah menanti dengan tidak sabar.

Faktor utama yang menyumbang terhadap perubahan positif ini (diidentifikasi melalui evaluasi peserta terhadap kegiatan dan latihan refleksi bersama staf ACCESS Tahap II) merupakan cara kerja ACCESS Tahap II. Khususnya:

- Kejelasan dari keseluruhan tujuan akhir (pernyataan utama – lihat Gambar 1), prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar, pendekatan-pendekatan (yakni, Outcome Mapping, CLAPP +++, the DCEP dsb.), kerangka kerja dan metode menciptakan sebuah proses umpan balik yang positif bagi mitra-mitra ACCESS dan stakeholder lainnya.
- Pendekatan ACCESS Tahap II tata pemerintahan lokal yang demokratis sebagai sebuah system dan karenanya, staf ACCESS secara terus-menerus melihat kesempatan untuk mempengaruhi budaya keorganisasian, kepemimpinan, personal dan system lainnya dibawahnya didalam organisasi mitra kita.
- Intensitas interaksi dengan mitra CSO lokal, khususnya oleh tim propinsi ACCESS, menyediakan kesempatan untuk berinteraksi dinamis dengan mitra-mitra ini untuk mengerti apa yang membuat mereka ‘memilih’ dan merancang intervensi yang dapat mengakibatkan perubahan.

Benar, apa yang dimulai ACCESS dengan DCEP hingga penilaian proposal merupakan proses yang memberdayakan bagi CSO yang terlibat. Pengalaman ini perlu didokumentasikan dan dapat menjadi sejenis buku saku untuk digunakan oleh CSO sebagai sebuah alat pembelajaran dan didalam mengembangkan kapasitas mereka” Bapak Tjatur Kukuh, aktifis LSM dan anggota panel penilaian, West Lombok

- Integrasi dari perubahan internal kedalam rancangan program membantu organisasi mitra untuk melihat bahwa pengembangan kapasitas merupakan pusat dari rancangan program.
- Mungkin yang terpenting dari semuanya adalah, komitmen staf ACCESS Tahap II terhadap nilai-nilai program, dan mempraktekkan perilaku yang baik setiap harinya yang menyumbang sebagian besar capaian hingga saat ini.

2.2.2 Tujuan 2

OMS mitra secara teratur melakukan dalam rangka mendorong tat pemerintahan demokratis di lingkup kabupaten, kecamatan dan desa.

ACCESS Tahap II berada pada jalurnya untuk mencapai Tujuan 2 diakhir Program. Selama enam bulan terakhir CSO diseluruh kabupaten sasaran bekerja bersama mengenai isu-isu tata pemerintahan demokratis.



Abggota CSO di Sumba mendiskusikan Rencana Aksi.

Di delapan kabupaten lama, sebagian besar organisasi lokal³ telah bersekutu untuk bekerja bersama pada prioritas umum yang diidentifikasi didalam lokakarya DCEP⁴ yang diselenggarakan diakhir 2008. Organisasi tersebut melihat manfaat menggabungkan aset mereka dan dampak yang lebih besar yang dapat mereka capai dengan bekerja sama, yang merupakan bukti dengan beberapa organisasi berbagi fasilitator didalam lokakarya dan penilaian

dan bersama-sama kedepan berbagi pendekatan dan rencana proyek mereka. Selama masa penilaian proyek proposal, pelaku dari CSO lainnya diundang untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan dan meminta klarifikasi sekaligus menambahkan nilai terhadap rancangan proyek masing-masing.

Di delapan kabupaten baru, seminar yang terstruktur dan lokakarya mengenai Tata Pemerintahan Lokal Yang Demokratis dan lokakarya DCEP menyediakan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan membangun komitmen terhadap berbagai pelaku CSO, sektor swasta dan pemerintah. Diskusi diantara stakeholder tersebut mengenai sifat dan peran dari DSC berlanjut di kabupaten baru. Diskusi tersebut telah membantu organisasi setempat untuk melihat bahwa kerjasama, dalam berbagai bentuk, sangat penting bagi kesuksesan.

Faktor yang menyumbang terhadap tumbuhnya kemampuan dan keinginan untuk bekerja bersama termasuk diantaranya:

- Strategi ACCESS Tahap II didalam mentransfer pusat kekuatan untuk rancangan program dari “donor” (ACCESS) kepada CSO lokal telah menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar dan oleh karena itu organisasi sepertinya cenderung bekerjasama didalam mencapai visi kabupaten.

³ Jaringan Masyarakat Sipil di West Lombok, Koppesda dan YCM di East Sumba, Yasalti dan Wahani di Sumba Barat, Aliansi Masyarakat Sipil di Jeneponto, Aliansi Mareje - Bonga di Lombok Tengah.

⁴ Lokakarya DCEP sendiri menyediakan ruang dimana CSO dapat bertemu dan menyusun sebuah rencana aksi bersama.

- Pertemuan rutin DSC untuk mendiskusikan isu-isu lokal berkaitan dengan visi kabupaten dilihat oleh CSO lokal sangat membantu didalam mempromosikan rasa kerjasama.
- Penilaian berbasis desa terhadap proyek proposal CSO mendorong rasa kepercayaan dan transparansi diantara pelaku lokal.
- Mempromosikan dialog dan pembelajaran diantara CSO pada basis yang rutin mendorong untuk saling berbagi dan mendorong kerjasama.

Tujuan 3

OMS mitra secara teratur berinteraksi secara dinamis dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam rangka mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial dan penyampaian pelayanan yang memihak kaum miskin dan kaum perempuan.

ACCESS Tahap II telah membuat perubahan penting didalam mempromosikan keterlibatan dinamis CSO mitra dengan Pemerintah daerah di semua tingkat. Suksesnya keterlibatan dinamis ini dapat diukur dalam kontribusi Pemerintah daerah dalam bentuk sumbangan pendanaan terhadap proyek CSO mitra ACCESS (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Kontribusi Pemerintah daerah terhadap PGA Mitra CSO ACCESS

Judul Proyek	Masa Pelaksanaan	Total Anggaran (Rp.)	Kontribusi tahun pertama	
			ACCESS	PEMERINTAH LOKAL
Partisipasi warga didalam perencanaan dan pengembangan dari pembangunan desa di kabupaten Jeneponto– Mitra Turatea	3 tahun	1.936.575.000	659.135.000	241.640.000
Usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal – Kabupaten Jenepont – Koptan Assamaturu	3 tahun	544.420.000	271.775.000	67.260.000
Jeneponto Go Green – GP3A Jeneponto	3 tahun	666.704.000	331.002.500	19.425.000
Meningkatkan kapasitas lembaga kebijakan public dan warga untuk membantu pengembangan lokal yang partisipatif, transparan dan akuntabel - Bantaeng – YAJALINDO	3 tahun	1.269.600.000	634.800.000	540.000.000
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BumDes yang transparan, dan mendorong adanya keberlanjutan – Bantaeng - Jaringmas	3 tahun	734.710.000	367.355.000	360.000.000
Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan public– Bantaeng – Yayasan Karaeng Opu	2,5 tahun	734.120.000	367.060.000	301.490.000
Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, Akuntabel, Inklusif dan Berbasis Aset - Sumba Timur-YCM	2,5 tahun	1.439.141.250	1.380.985.000	58.156.250
Perencanaan dan Penganggaran Desa untuk Ekonomi Desa yang Adil di Sumba Barat---Bahtera *	2,5 tahun	2.364.631.750	1.972.769,250	384.137.500
Penguatan Potensi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan - Sumba Timur -Satu Visi*	3 tahun	934.546.250	899.546.250	35.000.000
Peningkatan Partisipasi Warga	3 tahun	895.055.000	(nilai pasti untuk	542.705.000

Judul Proyek	Masa Pelaksanaan	Total Anggaran (Rp.)	Kontribusi tahun pertama	
			ACCESS	PEMERINTAH LOKAL
dan CSO didalam Pendidikan Dasar- Buton- Prima*			1 tahun belum ada)	
TOTAL		11,519,503,250	6,884,428,000	2,549,813,750

*PGA yang memuat angka angka telah dibuat tetapi belum ditandatangani oleh CSO mitra

Tingkat keterlibatan dinamis jauh melebihi kontribusi keuangan. Di sebagian besar kabupaten, dinas setempat bekerja bersama dengan mitra didalam penyampaian pelatihan dan kegiatan lainnya. Sebagai contoh, di Bantaeng, pelatihan gabungan telah diselenggarakan mengenai pengembangan ekonomi desa dan perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal (BUM Des). Di kasus lainnya, Pemerintah daerah bekerja bersama dengan CSO lokal didalam pengembangan peraturan dan undang-undang-undang yang diadvokasi oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga menanggapi secara positif terhadap pendekatan berbasis kekuatan yang dipromosikan oleh ACCESS Tahap II dan mitranya sebagaimana mereka semakin meningkat mengakui kebutuhan untuk pembangunan yang dikehendaki masyarakat dengan pemerintah memainkan sebuah peran fasilitator.

Keterlibatan dinamis ACCESS Tahap II dan mitra lokal melalui kegiatan, presentasi dan dengar pendapat telah meningkatkan tingkat kepercayaan diantara pemerintah dan CSO lokal, khususnya di delapan kabupaten baru, dimana sebelumnya hubungan antara pemerintah dan CSO lokal seringkali konfrontasional. Hal ini merupakan perubahan yang baik dan baik pegawai pemerintah dan staf CSO melihat manfaat dari bekerja bersama dan disaat yang sama mempertahankan kemandirian. Faktor-faktor yang secara positif mempengaruhi perubahan ini diantaranya:

- Strategi keterlibatan dinamis ACCESS Tahap II. Belajar dari ACCESS Tahap I, program secara aktif mendorong keterlibatan dinamis diantara para pelaku penting dan menyediakan forum-forum terstruktur untuk mendiskusikan isu-isu penting didalam tata pemerintahan lokal yang demokratis.
- Memperkenalkan pejabat-pejabat penting pemerintah (diantaranya Bupati, Head Kepala Bappeda, Kepala BPMD, Sekda, Camat dan kepala desa) melalui keterlibatan dinamis didalam kegiatan seperti halnya lokakarya, pelatihan, penilaian telah memungkinkan pelaku-pelaku tersebut untuk menilai pentingnya pendekatan berbasis kekuatan dan pendekatan partisipatif terhadap program mereka masing-masing. Pada khususnya, CLAPP+++, AI dan OM telah diakui sebagai sesuatu yang inovatif, relevan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Tanggapan secara umum adalah "Ah, inilah yang kita cari selama ini!" daripada "Mengapa ACCESS Mengkenalkan sesuatu yang baru dan tidak tercakup didalam peraturan?"

"Kami berharap dapat merevisi manual CLAPP untuk kami gunakan sebagai panduan dalam pekerjaan kami didalam menyusun rencana berbasis desa. Kami berencana untuk meningkatkan kualitas staf kecamatan sehingga mereka mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat didalam mengelola pembangunan (Umbu Hapu M dari BPMD, Sumba Timur dan Zainal Abbas dari BAPPEDA Sumba Timur

"di tahun 2010, kami akan mencoba untuk menggunakan sebuah proses partisipatif dengan alat CLAPP +++ untuk membuat profil desa dan kecamatan untuk digunakan sebagai sebuah model bagi Dompu. Kami berharap bahwa ACCESS mampu untuk menyediakan masukan dan bantuan kepada kami didalam melaksanakan program ini" (Pak Risman, Kasubid Keuangan dan Industri, Bappeda Dompu)

- ACCESS beserta mitranya telah mengundang pegawai pemerintah dari berbagai tingkatan untuk berpartisipasi untuk berpartisipasi didalam perencanaan dan penilaian sosial tingkat desa (sebagai persiapan penyusunan proyek proposal), dan didalam penilaian proyek proposal tersebut. Hal tersebut memungkinkan pegawai pemerintah tersebut melihat bagaimana proses ini berjalan di lapangan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat yang memiliki pengalaman langsung didalam proses pemberdayaan yang diselenggarakan, meningkatkan keingintahuan dan komitmen para pegawai pemerintah.

2.2.3 Tujuan 4

Program pemerintah dan program lembaga donor mempertimbangkan pembelajaran dan praktek yang baik dari ACCESS Tahap II.

Pendekatan strategis ketiga ACCESS Tahap II (lihat Gambar 1) bersangkutan dengan bagaimana menyumbang bantuan pengembangan secara lebih efektif sesuai dengan [Paris Declaration](#) dan [Jakarta Commitment](#). ACCESS Tahap II ikut serta memastikan up-scaling terhadap kegiatan dan pendekatan dan mencari kerjasama serta berbagi pengalaman dan berjejaring dengan organisasi, lembaga donor dan organisasi lainnya sebagai syarat utama untuk mencapai hal ini. Baik staf ACCESS yang berada di Bali maupun staf yang berada Kantor Propinsi telah sangat aktif selama masa pelaporan didalam melaksanakan strategi komunikasi ACCESS Tahap II, dimana terfokus pada upaya up-scaling hingga sejumlah lembaga-lembaga nasional strategis dan lembaga donor, Pemerintah Propinsi dan upaya-upaya untuk memperluas dampak ditingkat kabupaten.

Ditingkat Propinsi merupakan tujuan utama ACCESS untuk menarik perhatian dari Pemerintah Propinsi dan mendapatkan komitmen mereka guna memastikan perilaku-perilaku bernilai di empat propinsi sasaran dibagi pengalamannya dengan kabupaten lainnya di propinsi tersebut, serta propinsi lainnya, bila memungkinkan.



Gorontalo Provincial Government and JICA study tour discussing with Jeneponto Govt

Selama masa pelaporan, staf ACCESS mengadakan pertemuan dengan Gubernur dan staf utama dari Pemerintah Propinsi di seluruh propinsi sasaran. Upaya-upaya ini telah sukses didalam scaling-up diluar propinsi sasaran dengan Pemerintah Propinsi Gorontalo mengunjungi kabupaten Jeneponto dan mitra ACCESS (penyedia layanan lokal) *Lembaga Mitra Turatea* untuk belajar mengenai upaya-upaya kerjasama

mereka didalam pemetaan desa, latihan perencanaan dan pengembangan RPJMDes dengan menggunakan CLAPP+++ paling tidak di satu kabupaten di Gorontalo.

Ditingkat kabupaten, staf ACCESS Tahap II terus-menerus secara aktif terlibat didalam interaksi dinamis dengan Pemerintah daerah melalui pertemuan koordinasi rutin dan pelaporan rutin. Terdapat tanggapan positif di kabupaten baru terhadap pendekatan ACCESS. Di delapan kabupaten lama terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten didalam membantu pendekatan ACCESS dan komitmen tersebut telah dipererat didalam alokasi dana Rp.2,549,813,750 untuk mereplikasi proses selama 2010-2011 (lihat Tabel 1 untuk lebih detilnya).

ACCESS Tahap II juga menyediakan kesempatan bagi Pemerintah daerah dan CSO untuk belajar dari proses negosiasi perjanjian dan consensus tentang prioritas, kebijakan dan program yang menciptakan insentif bagi tindakan kerjasama (lihat juga di Tujuan 3). Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda di Sumba Barat, "*Ini pertama kali Pemerintah daerah Sumba Barat mengalokasikan dana yang besar untuk kerjasama dengan lembaga donor bagi program pengembangan masyarakat. Dalam kerjasama dengan lembaga donor di masa lalu, pemerintah berharap untuk mendapatkan sumbangan yang lebih besar dari lembaga donor, sementara kontribusi dari pemerintah kurang atau tidak ada sama sekali*". (Drs Alo). Pemerintah yang sama juga berjanji untuk mengalokasikan dana hingga seluruh desa menghasilkan RPJMDes dan bekerjasama didalam monitoring bersama terhadap rencana tindakan CSO. Sementara itu, beberapa desa dan pejabat kecamatan telah berjanji untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan dan menyediakan tempat pertemuan dan konsumsinya.

Contoh tersebut merupakan bukti bahwa Pemerintah daerah menilai, menghargai dan mengakui kontribusi CSO terhadap proses pemerintah. Sebagai hasilnya, Pemerintah daerah lebih menganggap memperlakukan CSO sebagai mitra dengan bukti mengundang mereka untuk merencanakan dan mereview pertemuan. Menunjukkan pula bahwa pemerintah mendengar suara masyarakat (termasuk kaum miskin dan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya) seperti penyediaan dana bagi program pengurangan kemiskinan dalam sektor teknis yang berbeda (seperti halnya kesehatan, pendidikan dan pertanian).

Ditingkat program AusAID, ACCESS Tahap II bekerjasama dengan dan berbagi pembelajaran dengan sejumlah program AusAID guna memastikan dampak pengembangan yang lebih efektif. Dibawah ini menyampaikan beberapa event penting dan inisiatif yang dimulai selama masa pelaporan ini:

AIP-MNH – Koordinasi dan kerjasama dengan AIP-MNH di Sumba Timur dan Sumba Barat terus berlanjut dan ACCESS sekarang mencari kesempatan untuk bekerjasama di kabupaten baru di Kupang dan TTS. in. Pada September 2009, staf propinsi di Kupang dan Team Leader dari program AIP-MNH bertemu dengan AusAID Counsellor yang baru, Helen MacFarlane dan Health Program Manager, Amanda Simmonds di kantor ACCESS di NTT. Staf ACCESS mendiskusikan kemungkinan menggunakan RPJMDes yang didukung oleh ACCESS sebagai pintu masuk bagi bantuan tingkat desa AIP-MNH. Kepentingan khusus dari kunjungan tim AusAID dan AIP-MNH adalah Strategi ACCESS untuk menasar lokasi yang terpencil karena banyak lembaga donor yang ada cenderung terfokus pada kecamatan yang lebih mudah diakses. Tindakan kerjasama seperti ini meningkatkan cakupan untuk berbagi informasi dan pembelajaran, mempromosikan keselarasan lembaga donor dan meningkatkan penyampaian pelayanan public.

ANTARA – MKPPdes sedang disusun dimana akan diujicobakan di Flores Timur (ANTARA) dan didalam kabupaten yang ditunjuk ACCESS di NTB atau NTT (belum ditentukan). ACCESS dan ANTARA juga mendiskusikan kemungkinan kerjasama di NTB tentang perencanaan partisipatif di kecamatan yang ditunjuk.

AIPD – ACCESS menyumbang pengembangan kerangka kerja dan terhadap tim rancangan untuk perancangan AIPD, dimana terfokus pada peningkatan prestasi pemerintah di berbagai tingkat dan meningkatkan tingkat dan kualitas partisipasi warga.

Direct Aid Program (DAP) – Australian Consulate mengunjungi daerah lokasi ACCESS di Lombok dan menggunakan jaringan ACCESS di NTB sebagai titik fokus untuk pencarian kesempatan bagi pendanaan kecil yang terfokus pada kelompok perempuan dan kelompok yang terpinggirkan.

LOGICA – ACCESS dan LOGIA melakukan presentasi bersama kepada AusAID mengenai pengalaman bekerja ditingkat sub-nasional membantu interaksi dinamis diantara sisi kebutuhan dan supply dari tata pemerintahan ditingkat lokal.

Ditingkat program-program lembaga donor dan lembaga donor lainnya, telah terdapat interaksi dinamis antara PNPM dan ACCESS Tahap II dengan hasil yang positif. Fasilitator kabupaten PNPM telah terlibat didalam menilai proposal dana hibah ACCESS Tahap II. ACCESS juga telah bekerja dengan PNPM untuk membangun kesepakatan bersama bagi perencanaan berbasis masyarakat di NTB, Sulawesi Tenggara, NTT dan Sulawesi Selatan.

Pertemuan yang diinisiasi ACCESS Tahap II dengan JICA-Capacity Development Program, NZAID begitu pula dengan program CIDA-BASICS. Pada seluruh kasus, ACCESS berbagi informasi dengan mitra, tentang berbagai pendekatan dan mencoba menemukan kemungkinan untuk bersinergi.

Interaksi dinamis program dengan lembaga donor non-pemerintah termasuk Rotary Club Seminyak. Setelah presentasi ACCESS bulan Mei dan September 2009, Rotary Club telah menggunakan RPJMDes desa Tanara yang disusun atas bantuan ACCESS sebagai dasar bagi program pengembangan masyarakat mereka. Sebagai hasil dari prioritas yang berhasil diidentifikasi didalam RPJMDes, Rotary Club membantu pembangunan 18 buah sumur galian, dimana 8 telah diselesaikan. Rotary Club telah membuat komitmen untuk berkoordinasi dengan ACCESS mengenai program yang mereka rencanakan bagi desa lainnya.

Staf ACCESS terus-menerus menginisiasi dan menjadi terlibat aktif didalam pertemuan koordinasi dengan lembaga donor lainnya guna memastikan adanya kerjasama dan berbagi informasi. Upaya-upaya koordinasi selama masa pelaporan termasuk diantaranya:

- Pertemuan koordinasi dengan coordinator proyek PRIME yang dijalankan oleh Oxfam-GB dan didanai oleh AusAID.
- Menghadiri lokakarya Oxfam East Asia Gender Justice Working Group – Linking and Learning
- Pertemuan koordinasi Oxfam-Australia
- Presentasi IDS mengenai metodologi dan hal-hal yang dipelajari dari pelaksanaan program ACCESS.
- Pertemuan rutin koordinasi dengan fasilitasi yang didukung PNPM di Jakarta.
- Pertemuan rutin dengan proyek berbasis lokal termasuk JICA-Makasar, GLG-GTZ-Kupang dan MDGs -UNDP & Bappenas di wilayah sasaran
- Pertemuan koordinasi Ford Foundation – SAPA

3 Perkembangan Pelaksanaan Terhadap Lima Functional Area ACCESS Tahap II

Sejumlah kegiatan penting program telah diidentifikasi selama tahap rancangan. Kegiatan-kegiatan tersebut, dikelompokkan dibawah lima functional areas, menjelaskan peran dan tanggung jawab Program serta stakeholder lainnya. Perkembangan berdasarkan functional areas ini dijelaskan dibawah, sementara perkembangan berdasarkan indikator output dan kegiatan bagi Functional Areas

untuk pelaporan periode Mei hingga Oktober 2009 dijelaskan didalam Progress Monitoring Matrix dalam Lampiran 2.

4 Functional Area 1: Menyediakan sumberdaya dan mengelola Program

Tim manajemen dan administrasi ACCESS Tahap II telah berada di jalurnya dalam hal pengadaan dan pengelolaan Program. Seluruh kantor telah didirikan, dan memiliki perlengkapan yang lengkap beserta stafnya.

Sistem dan prosedur management telah ada dan diaudit baik secara eksternal dan internal selama masa pelaporan. Tidak terdapat contoh sebuah masalah.

Website program telah diperbaharui setiap bulannya. Terdapat perubahan lebih lanjut terhadap ERSULA, yang mengharuskan program untuk 'off-line'. Staf masih bekerja untuk memasukkan kembali data, dimana seharusnya telah selesai pada masa pelaporan berikutnya.

Program menyediakan dukungan secretarial dan disampaikan pada pertemuan PCC ketiga, yang diadakan di Jakarta bulan Mei 2009. Tujuan dari pertemuan adalah untuk mengesahkan arahan Program dan Rencana Tahunan Program. Para anggota pemerintah menghargai ACCESS atas kolaborasinya dengan PNPM dan mendorong Pemerintah daerah untuk terus mengambil peran aktif didalam Program. PCC secara penuh mengesahkan Rencana Tahunan untuk tahun ke-2.

Program juga menyediakan dukungan kepada misi monitoring kedua yang ditunjuk ACCESS dan ditemani tim MRG untuk berkunjung ke lapangan (lihat pada bab 4.1 untuk lebih jelasnya).

Tanangan utama didalam Functional Area 1 diantaranya:

- Mengelola potensi staf kehabisan energi dikarenakan beban kerja tim Propinsi semakin meningkat;
- Menjadikan sistem dan prosedur mudah untuk digunakan sambil tetap menjaga kewajiban bagi akuntabilitas; dan
- Mendorong adanya rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap proses dan pembuatan keputusan oleh Provincial Coordinators dan menyeimbangkan hal itu dengan tingkat pandangan tertentu guna memastikan proses dan prosedur masih diikuti.

4.1 Functional Area 2: Berinteraksi dinamis dengan Masyarakat Sipil dan Pemerintah lokal berdasar pada nilai-nilai dan prinsip bersama.

Perkembangan yang baik telah dihasilkan didalam Functional Area 2 dalam enam bulan terakhir. Semua kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan di 16 kabupaten dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari para peserta.

Di kabupaten baru, kegiatan penting selama enam bulan terakhir terfokus pada:

CSI di kabupaten baru⁵: Lokakarya CSI diadakan di seluruh delapan kabupaten baru pada bulan Juni dan awal Juli 2009. 325 orang berpartisipasi didalam lokakarya ini dengan 52% pesertanya adalah perempuan dan 48% laki-laki. Para peserta datang dari masyarakat, LSM, Pemerintah dan lain-lain (DPRD, Media, dan Akademisi dsb.). Sebagian peserta merasa puas dengan prosesnya, dimana 90% peserta menyatakan puas atau sangat puas sebagai bagian dari evaluasi mereka. Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi untuk penguatan Masyarakat Sipil (CS) dan rekomendasi ini diambil oleh kelompok-kelompok peserta. Hasil dari CSI memberikan sebuah dasar yang baik dan analisa terhadap situasi saat ini di kabupaten dan akan tidak bernilai didalam evaluasi dampak ACCESS Tahap II.

Mungkin hasil langsung yang paling penting dari lokakarya adalah identifikasi terhadap pelaku-pelaku utama yang mendukung tata pemerintahan yang demokratis dan peran CSO didalamnya. Para pelaku utama ini selanjutnya didorong untuk bertemu bersama untuk mendiskusikan tindak lanjut terhadap isu-isu.

“Juara-juara” tersebut menjadi inti dari panitia stakeholder kabupaten (DSC). Di Kupang, satu hasil langsung dari lokakarya adalah terbentuknya jaringan perempuan, dimana menyertakan organisasi keagamaan perempuan (Kristen Protestan, Katolik dan Muslim), Pemerintah daerah (Kantor Pemberdayaan Perempuan), dan sejumlah LSM lokal untuk mendorong lebih jauh keterlibatan perempuan didalam proses perencanaan dan penganggaran ditingkat desa. Jaringan tersebut telah bertemu dua kali sejak lokakarya CSI untuk mendiskusikan ukuran-ukuran yang sifatnya kerjasama.

Pembentukan DSC di kabupaten baru: Diseluruh delapan kabupaten baru, embrio



Pertemuan DSC embrio di Dompu

DSC dimulai dengan mendiskusikan isu-isu penting berkaitan dengan pengembangan dan tata pemerintahan lokal yang demokratis. Kelompok-kelompok tersebut ukurannya bermacam-macam, Takalar dan Gowa memiliki pertemuan yang besar (dengan masing-masing 71 dan 57 peserta), sementara di Kupang, TTS, Bima dan Dompu kelompok yang terbentuk jauh lebih kecil. DSC embrio ini telah proaktif tidak hanya mengorganisir pertemuan

diantara mereka sendiri, tetapi juga didalam berinteraksi dinamis dengan Pemerintah daerah mengenai isu-isu lokal. Di bulan Agustus, DSC ingin mengadakan sebuah “summit” untuk menyempurnakan visi secara jelas bagi tata pemerintahan lokal yang demokratis untuk kabupaten mereka masing-masing.

⁵ CSI merupakan sebuah proses yang menyertakan penelitian dan sebuah lokakarya dimana berbagai stakeholder bertemu untuk menilai “kesehatan” relative dari masyarakat sipil di empat wilayah kunci:

1. Lingkungan konkusif bagi tumbuhnya Masyarakat Sipil,
2. Struktur organisasi masyarakat sipil termasuk keluasaan dan kedalaman partisipasi,
3. Nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pemerintahan yang demokratis, dan
4. Dampak pada perempuan, kelompok miskin dan yang terpinggirkan.

Berbagi pembelajaran dari ACCESS Tahap I: Diseluruh kabupaten baru, kegiatan telah dilaksanakan untuk membiasakan para pelaku utama dengan pembelajaran penting dari ACCESS tahap I dan pembelajaran yang muncul dari pelaksanaan di delapan kabupaten lama selama tahap II. Di Dompu dan Bima menyertakan pengenalan terhadap CLAPP; Pendekatan Berbasis Kekuatan; ODSI; Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis dan GSI. Sebuah seminar diadakan di Kupang dan TTS dengan tekanan khusus pada bagaimana ACCESS bekerja pada isu-isu pemberdayaan melalui CLAPP. Sebuah lokakarya gabungan diadakan di Sulawesi Selatan ditingkat propinsi guna mengenalkan ACCESS, tentang nilai-nilai dan pendekatannya. Di Sulawesi Tenggara para peserta dari Bau-Bau dan Buton Utara terlibat didalam sebuah lokakarya mengenai perubahan CLAPP untuk menjadikannya lebih inklusif secara sosial dan berbasis aset. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menciptakan kesepakatan yang baik mengenai antusiasme bagi Program ACCESS Tahap II sebagai keseluruhan dan bagi pendekatan tertentu serta alat-alat yang dapat digunakan oleh pemerintah dan CSO didalam mendorong tata pemerintahan yang demokratis.

Persiapan untuk DCEP: Dalam persiapannya untuk DCEP di kabupaten baru (diselenggarakan diakhir Oktober dan awal November), 24 fasilitator (12 perempuan dan 12 laki-laki) dipilih dan dilatih oleh Mitra Strategis kami, INSPIRIT, mengenai Metodologi AI. Sebuah buku panduan dihasilkan selama masa pelaporan dan dibagi dengan para peserta selama lokakarya. Sekembalinya, para fasilitator mengenalkan proses kepada DSC dan mulai mengadakan wawancara Apresiatif (hingga hari ini telah dilaksanakan 240 wawancara apresiatif dengan 116 perempuan dan 124 laki-laki). Seluruh peserta lokakarya (sekitar 300 orang dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan CSO lokal) telah diwawancarai sebelum lokakarya dimulai pada masa pelaporan berikutnya.

Penguatan DSC di kabupaten lama: Di delapan kabupaten yang lama, focus perhatian selama masa ini adalah pada perencanaan dan penilaian sosial desa untuk pelaksanaan agenda DCEP melalui Rencana Aksi (proyek proposal dilaksanakan oleh mitra CSO lokal). Selama proses tersebut, DSC terlibat didalam menyajikan hasil dari penilaian sosial tingkat desa dan didalam penilaian proyek proposal. DSC terus bertemu secara rutin selama masa pelaporan.

Tantangan utama terkait dengan penyampaian kegiatan dibawah Functional Area 2 terpusat pada kebutuhan untuk menciptakan rasa kepemilikan yang lebih dalam oleh CS dan stakeholder pemerintah terhadap DCEP dan prioritas yang diidentifikasi didalam DCEP. Rasa kepemilikan adalah kritis terhadap keberlanjutan, tetapi bertentangan dengan sebagian besar kenyataan saat ini. ACCESS perlu untuk terus-menerus bekerja keras untuk menguatkan mengapa rasa kepemilikan sangat penting dan bagaimana bias diwujudkan dan dicapai.

4.2 Functional Area 3: membangun kapasitas dari intitusi-institusi lokal untuk memenuhi fungsi dalam membangun demokrasi yang terdesentralisasi.

Selama enam bulan terakhir, perkembangan yang cukup penting telah terjadi didalam Functional Area 3. Seluruh kegiatan yang direncanakan didalam masa pelaporan ini telah dilaksanakan dan kegiatan utama termasuk diantaranya.



Perwakilan dari CSOs di Bompou dan Bima menghadiri sebuah pelatihan ODST

Penilaian Pengembangan Kapasitas:

kegiatan ini dilaksanakan dengan cara yang menarik. Daripada melaksanakan Penilaian Kebutuhan Pembelajaran secara tradisional, identifikasi kebutuhan CB dimasukkan kedalam proses yang digunakan oleh mitra CSO ACCESS untuk menyusun proyek proposal mereka dengan menggunakan OM sebagai kerangka kerja dan ODST sebagai pemandunya.

ACCESS merasa kritis bahwa CB tidak dilihat sebagai sebuah tambahan kegiatan yang terpisah dan tidak

berkaitan dengan urusan utama dari organisasi mitra. Kerangka kerja OM meminjamkannya sendiri secara sempurna terhadap ide ini. Hasil dari penilaian CB CSO selanjutnya dikompilasikan kedalam rencana rencana CB program, propinsi dan kabupaten.

Rencana CB Kabupaten dan Propinsi: Rencana CB diselesaikan oleh tiap kabupaten sasaran dan propinsi sasaran selama masa pelaporan. Keterbatasan dana yang tersedia bagi CB di ACCESS Tahap II (kurang lebih AUD\$5,692,500 untuk masa lima tahun, atau \$71,156 per kabupaten/tahun), tim Propinsi ACCESS harus berhati-hati terhadap hal apa yang paling efektif didalam penggunaan dana yang terbatas tersebut, dan intervensi apa yang akan mengakibatkan perubahan terbesar. Dengan rencana CB ditangan, tim ACCESS datang bersama-sama pada Pertemuan Tiga Bulanan Koordinasi dan Pembelajaran (CLM) pada bulan September dan menghasilkan Rencana CB umum untuk ACCESS tahap II 2009-2010.

Mengidentifikasi dan memilih Mitra Strategis : Melalui proses tender, 13 penyedia layanan dipilih untuk disertakan didalam daftar Mitra Strategis potensial bagi ACCESS (lihat Tabel 2) untuk digunakan didalam penyampaian bantuan CB di sejumlah wilayah tehnis, seperti yang disyaratkan didalam Rencana CB ACCESS.

Tabel 2: Hasil Tender CB ACCESS

Penyedia Layanan yang Dipilih	Topik Pengembangan Kapasitas
CD BETHESDA	Fasilitasi
GITA PERTIWI	Manajemen Sumber Daya Alam, Pengembangan Ekonomi Desa, Kepemimpinan Perempuan
ICW	Advokasi, Penganggaran
INSPIRIT	Pendekatan Berbasis Aset, Kepemimpinan Perempuan, Fasilitasi
Kawanusa	Pengorganisasian, Pembelajaran, Advokasi, Pengembangan Ekonomi Desa
Pattiro	GSI
PIAR	Legal Drafting
PSHK	Legal Drafting
Remdec	Pengorganisasian, Tata Pemerintahan yang Demokratis, GSI, M&E
Satu Nama	Pengorganisasian, Penganggaran, Tata Pemerintahan yang Demokratis, M&E, Fasilitasi, Manajemen Sumber Daya Alam,

Penyedia Layanan yang Dipilih	Topik Pengembangan Kapasitas
	Pengembangan Ekonomi Desa
YAO	Kepemimpinan Perempuan
YAPPIKA	Penganggaran, Tata Pemerintahan yang Demokratis, Pembelajaran, M&E, Advokasi

Sebuah pertemuan diadakan dengan seluruh penyedia layanan terpilih di Jakarta untuk menyampaikan program ACCESS Tahap II secara umum dan membangun pemahaman yang sama mengenai cara program CB akan berjalan.

Perbaikan CLAPP: Selama enam bulan terakhir, metodologi CLAPP telah diperbaiki dan dirubah untuk menjadikan metodologi lebih berbasis kekuatan, untuk memperdalam konsep GSI dan untuk memperluas metodologi dari perencanaan dan penilaian untuk menyertakan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Lokakarya review diadakan di seluruh empat propinsi dengan total partisipasi sebanyak 103 orang (49 perempuan dan 54 laki-laki). Perubahan sekarang telah selesai untuk bab perencanaan dan penganggaran dengan batas waktu hingga pertengahan November 2009.

Training of facilitators (TOF) bagi DCEP di kabupaten baru: Sebuah TOF diselenggarakan bagi fasilitator DCEP (17 perempuan dan 17 laki-laki) di Bali pada bulan Agustus 2009. Para peserta merasa puas dengan proses dan pembelajaran yang mereka lalui, dengan 95% peserta menilai pelatihan tersebut dengan tingkat kepuasan yang sangat puas atau puas.

Tidak ada kegiatan langsung yang dilaksanakan pada masa pelaporan ini yang secara khusus mengidentifikasi perempuan yang potensial dan pemimpin muda dan mengembangkan kapasitas mereka, seperti yang dijelaskan didalam Rencana Tahunan, dikarenakan kita sedang menunggu hasil dari analisa mendalam tentang kepemimpinan perempuan. Analisa itu saat ini sedang diadakan sebagai bagian dari dana hibah inovatif, dimana hasilnya akan tersedia selama masa pelaporan berikutnya.

Tantangan utama untuk mencapai sukses diwilayah CB adalah untuk mengembangkan pemahaman bersama dengan Mitra Strategis ACCESS dan memastikan komitmen yang terus-menerus dari para mitra tersebut terhadap nilai-nilai ACCESS dan pendekatan CB, khususnya penggunaan metodologi dan pendekatan GSI dan berbasis kekuatan.

4.3 Functional Area 4: Mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya pengembangan yang dilakukan secara mandiri.

Secara keseluruhan, didalam Functional Area 4 cukup memuaskan meskipun terdapat penundaan didalam pembayaran dana hibah dikarenakan mitra membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan didalam penilaian social mereka di desa dan menyiapkan proyek proposal mereka untuk dinilai.

Selama masa pelaporan, 23 Perjanjian Dana Hibah Proyek (PGA) diterbitkan untuk CSO untuk menjalankan penilaian social di desa dimana mereka ingin bekerja. 21 dari dana hibah tersebut telah diselesaikan dan dua sisanya masih dalam perkembangan. Dari 21 penilaian yang telah diselesaikan, 15 proyek proposal untuk

program pengembangan yang dipimpin oleh masyarakat telah diterima dan dinilai dan 10 PGA telah diterbitkan. Lima mitra CSO sisanya masih menyiapkan proposal mereka untuk diajukan.

Sepuluh rencana aksi yang disetujui hingga saat ini akan bekerja di 317 desa, 46 BUM Des, 27 kelompok pengguna air, 9 kelompok ekonomi desa, 71 pusat masyarakat, 4 kelompok pemuda, 20 asosiasi lingkungan dan di 120 proses Perencanaan Pengembangan Masa Pertengahan Desa.

Staf ACCESS terus-menerus menyediakan mentoring dan pelatihan dan bantuan teknis didalam persiapan proposal.



Penilaian Rencana Aksi Satu Visi di Desa Mamodu Sumba

Saat di ACCESS Tahap I, untuk meningkatkan transparansi, rasa kepemilikan didalam proses, dan untuk memastikan proses yang lebih tepat waktu maka, penilaian terhadap Proyek proposal mitra ACCESS dilaksanakan di lapangan, dengan partisipasi dari mitra-mitra CSO, stakeholder dan penerima manfaat langsung. Proses penilaian ini memungkinkan panel penilai, yang termasuk para ahli dari luar, anggota pemerintah dan staf ACCESS, untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan lengkap terhadap apa yang

direncanakan dan memungkinkan adanya tanggapan secara tepat waktu terhadap pertanyaan yang muncul.

Seperti ditunjukkan oleh angka pembayaran berdasarkan pada angka anggaran (lihat Gambar 5, bab 8.2.2), proses mitra CSO didalam melakukan penilaian melalui tahap pembuatan proyek proposal dan mengajukannya membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang dibayangkan. Proses tersebut telah direview sebagai bagian dari CLM yang diselenggarakan pada bulan September dan perubahan telah dilakukan dalam upaya mengurangi kerangka waktunya. Kami mengantisipasi bahwa perubahan ini akan mengurangi waktu total sejak tahap penilaian hingga penandatanganan PGA dari perkiraan 11 bulan menjadi enam hingga tujuh bulan.

Tantangan didalam melaksanakan Functional Area 4 akan menjaga mitra CSO tetap berada di jalurnya sementara disaat yang sama mencoba mendorong mitra untuk meng-arus-utamakan dan menjiwai nilai-nilai penting ACCESS.

4.4 Functional Area 5: Mendorong pembelajaran yang berkelanjutan dan perubahan kebijakan dan praktek baik internal maupun eksternal.

Telah terdapat perkembangan yang cukup baik dibawah Functional Area lima selama masa pelaporan ini. Kegiatan-kegiatan penting yang telah dijalankan pada masa pelaporan ini termasuk diantaranya:

Persiapan monitoring proyek yang didanai dana hibah oleh CSO

Enam lokakarya MEL diselenggarakan di kabupaten lama bagi mitra CSO ACCESS selama masa pelaporan (Lombok Tengah dan Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat, dan Jeneponto dan Bantaeng) untuk membantu mitra CSO didalam

meningkatkan rencana MEL mereka. Lokakarya MEL untuk Kabupaten Buton dan Muna akan dilaksanakan diawal masa pelaporan berikutnya.

Penguatan kapasitas DSC dalam menganalisa dan mereview proses dan perubahan lokal didalam kebijakan dan perilaku pemerintah.

"Hari ini pembelajaran telah dimulai, khususnya mengenai peran DSC. DSC harus aktif didalam monitoring. Hari ini rencana MEL DSC telah dibuat. Saya berharap akan menjadi awal yang baik bagi DSC dan kita semua". (anggota DSC, Bantaeng).

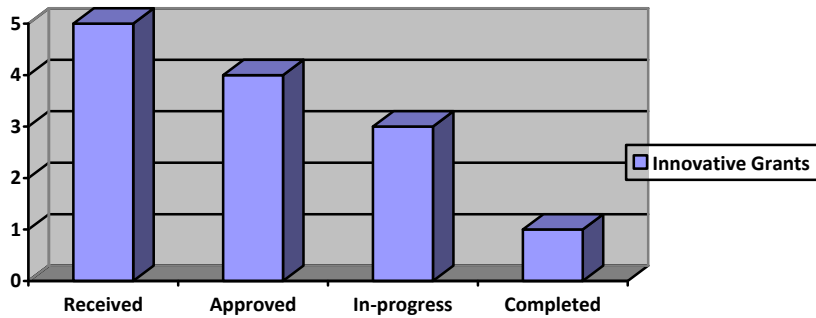
ACCESS mengadakan lokakarya MEL bagi DSC di Jeneponto dan Bantaeng dimana terdapat sedikit perbedaan pandangan mengenai peran DSC, yang memiliki implikasi bagi peran mereka dalam MEL. Sebagai contoh, DSC Jeneponto melihat peran DSC lebih pada berbagi pengetahuan dan membantu anggota perorangan

dimana DSC Bantaeng mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai seorang pelaku dalam tata pemerintahan lokal, dan ingin menggunakan MEL untuk advokasi mereka sendiri dengan Pemerintah daerah. ACCESS akan terus membantu DSC didalam menjelaskan seluruh peran, struktur dan tujuan mereka didalam menyusun rencana MEL mereka di masa pelaporan berikutnya.

Mengadakan program penelitian CSS dan analisa kebijakan bersama lembaga lokal dan membantu inisiatif CS inovatif.

ACCESS mengadakan sebuah proyek penelitian gabungan bersama dengan VECO Indonesia, sebuah LSM Belgia, menggunakan dana hibah penelitian yang diberi oleh ODI di UK, disebut "*Contextualising Outcome Mapping in Indonesia*", pertama kalinya di wilayah ini. Penelitian tersebut menghasilkan seperangkat prinsip-prinsip dan sebuah proses bagi kontekstualisasi dan laporan penelitian telah disebarluaskan melalui Outcome Mapping Learning Community global untuk dimintakan komentarnya (lihat general@outcomemapping.ca). Temuan lokakarya dan penelitian merupakan dasar bagi pengembangan OM Resource Kit Indonesia yang lengkap dan untuk pertama kalinya (dengan pendanaan dari ACCESS Innovative and Knowledge Sharing grant). Kit ini merupakan sumber daya yang berguna untuk memenuhi tumbuhnya kepentingan didalam dan kebutuhan bagi OM di Indonesia (dan diluar Indonesia).

Empat perjanjian dana hibah Innovative and Knowledge Sharing telah ditandatangani pada masa pelaporan ini (lihat Gambar 2 dibawah), termasuk sebuah dana hibah untuk mendanai Bulletin ACCESS, Outcome Mapping Resource Kit, sebuah penilaian intervensi CB oleh ACCESS tentang Kepemimpinan Perempuan, dan Debat Sekolah mengenai Pendidikan Politik di Dompu. Proposal lebih lanjut telah diterima dan disetujui untuk pengembangan studi kasus mengenai program pendidikan alternatif di Batulayar Lombok Barat.



Gambar 2: Dana Hibah Inovatif yang Diterbitkan bulan Mei-Oktober

ACCESS terus mengejar kemitraan penelitian dengan universitas Australia, dimana terbukti merupakan latihan yang menantang. Meskipun terdapat beberapa pertemuan dengan tiga universitas, tetapi tidak mengalami sukses untuk kelanjutannya dikarenakan komitmen akademis yang berat dan hambatan didalam mendapatkan dana penelitian. Walaupun begitu, terdapat dua pelajar S3 (doctoral) yang menggunakan ACCESS sebagai studi kasus didalam penelitian mereka.

Berbagi hal-hal yang telah dipelajari dan penyebarluasan alat dan metode didalam kabupaten dan diantara peserta ACCESS.

Sebagai bagian dari Strategi Komunikasi ACCESS, tim propinsi telah membuat rencana komunikasi tingkat propinsi untuk memandu hubungan luar bertujuan memfokuskan promosi ACCESS dengan stakeholder. Untuk masa ini, tim propinsi telah melaksanakan 145 kegiatan eksternal untuk mempromosikan Program termasuk diantaranya diskusi, pertemuan koordinasi dan kunjungan lapangan bersama DSC, PNPM, ANTARA, AIP-MNH, lembaga donor lainnya, akademisi, Pemerintah daerah dan media (lihat juga di bab 2.2.4).

Sejumlah 13 artikel di media telah diterbitkan mengenai ACCESS selama masa pelaporan dan staf ACCESS diwawancara i di radio di Sumba Barat, Kupang dan TV di Jeneponto. Program telah



mempromosikan pendekatan ACCESS dan hasilnya melalui edisi kedua dari Bulletin ACCESS. Edisi ini (24 halaman) dihasilkan dengan menggunakan ahli media dari luar guna meningkatkan kualitas publikasi. Empat ribu eksemplar telah didistribusikan diseluruh kabupaten ACCESS kepada pemerintah, CSO, masyarakat

dan secara nasional. Dua buah artikel mengenai ACCESS juga dipublikasikan melalui Intranet AusAID dan website ACCESS telah terdata hingga 122.914 selama masa enam bulan ini.

ACCESS telah menerima sejumlah pengunjung untuk melihat 'ACCESS sedang bekerja' termasuk diantaranya Parliamentary Secretary of International Development Assistance, Hon. Robert McMullan (Lombok Barat), AusAID Counsellor Helen McFarlane (Kupang), Australian Consul Melinda Rio (Lombok Barat), Chandra Bhakti dan Basilio Araujo dari Ministry of Home Affairs (Sulawesi Selatan) Gubernur NTB K.H. Zainul Majdima (Lombok Barat). Kunjungan seperti itu menyediakan sebuah kesempatan bagi penduduk desa untuk menunjukkan capaian mereka, dimana membuat mereka merasa bangga, yang pada akhirnya menjadi insentif bagi keberlanjutannya.

“Saya sangat senang mengunjungi Pusat Masyarakat Mandiri di Lombok dimana saya bertemu dengan beberapa perempuan yang inspirasional yang bekerja tanpa lelah di masyarakat. Bantuan yang diterima melalui jaringan ACCESS telah membantu mereka untuk berurusan dengan beberapa isu-isu mendasar yang penting termasuk kesehatan dan kekerasan rumah tangga. Sekarang mereka merasa lebih memiliki pertautan dengan kelompok lain yang berpikiran sama di Lombok dan mampu untuk melangkah kedalam sumber daya dari luar yang tersedia bagi mereka.” (Melinda Rion, Australian Consul)

Sebagai bagian dari berbagi pengetahuan, ACCESS berpartisipasi didalam lokakarya SoFEI di Makassar untuk pertukaran pengetahuan tentang perilaku pintar pada bulan Mei. Sebuah desa yang didukung oleh ACCESS juga ditunjukkan sebagai contoh perilaku pintar di Eastern Indonesian Forum pada bulan Agustus diadakan oleh SoFEI, dimana Ibu Jumilah, seorang pemimpin masyarakat, diundang untuk menceritakan cerita sukses program bebas buta huruf yang berbasis masyarakat. Sebuah presentasi pendek mengenai ACCESS juga dilakukan di Asia-Pacific Sociological Association Conference tentang demokrasi yang disengaja pada bulan Juni. ACCESS juga mengadakan sebuah kegiatan berbagi pengetahuan di Bali bagi 20 praktisi pengembangan berbasis lokal, dimana Anurahda Joshi dari International Development Institute, University of Sussex, UK memberikan sebuah presentasi mengenai “*Collective Action, Social Responsibility and Service Delivery*”.

ACCESS memberikan masukan terhadap tim rancangan bagi program AIPD yang baru, sementara Program Director dan MEL Adviser telah bertemu pada beberapa kesempatan dengan AusAID dan Staf PNPM World Bank guna mendiskusikan kesempatan kerjasama. Program Director telah diundang sebagai reviewer bagi rancangan baru pinjaman World Bank bagi PNPM untuk 2010.

Tantangan utama yang dihadapi oleh ACCESS didalam mempromosikan pembelajaran yang terus-menerus, perubahan kebijakan dan perilaku adalah seperti ungkapan lama *'kamu dapat memasukkan kuda kedalam air, tetapi tidak dapat membuatnya minum air'*. Pergeseran hubungan dan paradigma yang lama ditanamkan dalam masa yang relative pendek akan tetap menjadi tantangan yang terus-menerus bagi Program.

5 Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran

5.1 Monitoring dan Evaluasi

Participatory Monitoring Evaluation and Learning System (PAMELS) ACCESS Tahap II menyajikan dua hal yang terpisah tetapi terpadu bagi M&E, keduanya ditingkat Program dan ditingkat kegiatan.

Untuk monitoring tingkat Program selama masa pelaporan, staf ACCESS telah bekerja untuk mengkonsolidasikan dan melembagakan PAMELS. Hal itu termasuk menyelesaikan rancangan Management Information System (MIS - ERSULA). Bersama dengan panduan teknis yang telah direvisi dan pelatihan staf tentang ERSULA berarti bahwa staf ACCESS sekarang dapat memasukkan data pada seluruh monitoring kegiatan proyek, CB, dan mitra kedalam ERSULA untuk membantu perencanaan, pelaporan dan pembelajaran ACCESS. Sementara itu, kerja terus dilakukan pada pengembangan panduan monitoring bagi staf dan mitra. ACCESS dan Yappika (Mitra Strategis bertanggung jawab mengadakan CSI) bekerja bersama untuk mengidentifikasi sebuah daftar pendek mengenai indikator CSI yang dapat digunakan sebagai dasar bagi monitoring dampak perubahan didalam kekuatan CS di kabupaten oleh DSC.



MEL workshop for partners in Jeneponto

Untuk monitoring ditingkat kegiatan, staf ACCESS melaksanakan sejumlah kegiatan untuk mendukung mitra didalam monitoring dan evaluasi kegiatan mereka masa pelaporan ini, termasuk diantaranya lokakarya MEL di enam kabupaten lama (lihat bab 3.5). Terdapat berbagai pengalaman diantara para mitra ACCESS dan sebagian memiliki pengalaman yang kuat didalam melaksanakan monitoring partisipatif. Daripada menentukan alat atau metodologi diawal tahap bagi mitra, ACCESS lebih mendorong mereka untuk menggambarkan system M&E mereka untuk monitoring bersama konstituen mereka dan untuk berbagi pengalaman mereka dengan kawan-kawan CSO. Mitra yang memiliki pengalaman yang lebih sedikit meminta bantuan bersifat teknis dalam merancang alat yang tepat dan untuk kegiatan lapangan, yang akan didukung melalui Mitra Strategis ACCESS. Permintaan umum adalah

untuk pengalaman pembelajaran didalam menggunakan alat dan siap untuk digunakan untuk disampaikan kepada mitra.

Program ACCESS dimonitor selama masa pelaporan oleh MRG yang ditunjuk oleh ACCESS, terdiri dari the AusAID Activity Manager, perwakilan rekanan MOHA, Perwakilan pemerintah Propinsi dan seorang ahli M&E eksternal yang ditunjuk oleh. Penilaian keseluruhan dari misi MRG ditemukan bahwa *“ACCESS Tahap II secara program telah berada di jalur yang semestinya, dan bahwa hubungan penting bersifat kondusif untuk membantu perkembangan capaian pengembangan yang bernilai. Terdapat catatan mengenai hubungan internal yang kuat, dan perluasan interaksi dinamis dengan perwakilan Pemerintah daerah.”*⁶

⁶ Crawford, P, June 2009, “ACCESS Phase II MRG Mission 2 Report”, hal 4

Didalam CPA, yang diadakan setiap tahunnya oleh AusAID sebagai bagian dari proses monitoring, Program telah dinilai dengan murah hati, menerima ‘best practice’ berdasarkan berbagai factor prestasi kritis. CPA menyimpulkan bahwa “AusAID menerima tanggapan balik yang positif dari stakeholder Program sebagai sebuah hasil dari kualitas komunikasi dan hubungan yang baik yang telah dibangun oleh Program”.

Dalam hal pembelajaran, ACCESS Tahap II bekerja untuk menjadi sebuah ‘pusat’ pengetahuan bagi penyebarluasan pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sipil dan berbagi pembelajaran, strategi, pendekatan dan alat-alat. Selama enam bulan terakhir, tim Propinsi secara rutin mengajak mitra dan pemerintah local untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai pendekatan ACCESS. Pembelajaran khusus selama masa pelaporan ini didiskusikan didalam bab berikutnya.

5.2 Pembelajaran yang Diambil dari Pelaksanaan Program

Dibawah ini menyediakan sebuah ringkasan pelajaran penting yang dipelajari selama masa pelaporan Mei hingga Oktober 2009:

- ACCESS menerima tanggapan positif dari Pemerintah daerah, CSO lokal, anggota panel penilaian dan masyarakat mengenai pendekatannya terhadap penilaian social tingkat desa yang dilaksanakan oleh CSO mitra dan proses penilaian bagi proyek yang diajukan kepada ACCESS untuk dimintakan pendanaan – yang terlihat inklusif, partisipatif, sangat transparan dan akuntabel – hal-hal penting dimana Program memainkan peranan penting didalam menjadi contoh perilaku tata pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh pihak lainnya.
- Mempromosikan perilaku yang baik membantu menguatkan hubungan ACCESS dengan Pemerintah daerah, dikarenakan mereka melihat proses ACCESS dapat membantu mereka didalam menyusun program mereka sendiri dan menyusun prioritas didalam menyasar program kemiskinan. Baik pemerintah propinsi maupun kabupaten merasa senang untuk belajar dari ACCESS tahap II dan mitranya mengenai perencanaan tingkat desa yang menyertakan gender dan kaum miskin .
- Apabila forum berbagai stakeholder terdiri dari perorangan mau dipilih sendiri, seperti halnya DSC, memungkinkan untuk terbentuk secara organik, kelompok-kelompok ini terbentuk dengan cara yang sesuai dengan konteks dan kondisi mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk menyusun agenda mereka sendiri. Di Bau-Bau, sebagai contoh, anggota DSC mendiskusikan kualitas pelayanan public di sector kesehatan, berdasarkan pada berbagai pengalaman dengan perencanaan dan penganggaran, dan telah memutuskan untuk mendekati Kantor Kesehatan Kota Bau-Bau dan DPRD untuk mengeluarkan sebuah peraturan daerah mengenai standard minimal pelayanan public didalam sektor kesehatan. Meskipun begitu, bagi DSC untuk menjadi pelaku dinamis dan jangka panjang bagi perubahan tata pemerintahan lokal yang demokratis, DSC perlu mengembangkan rasa yang lebih kuat atas identitas, pemahaman yang lebih baik atas perannya dan rasa kepemilikan yang lebih dalam terhadap visi kabupaten. DSC perlu untuk membentuk *raison d’etre* mereka sendiri .
- Dengan menciptakan ruang untuk dialog, para pelaku mampu secara lebih baik melihat cara bagaimana mereka untuk bekerjasama. Sebagai contoh, di Lombok, keterlibatan ACCESS didalam pertemuan koordinasi lembaga donor dan berbagi

informasi pendekatan-pendekatan ACCESS telah menghasilkan berbagai kesempatan bagi kegiatan monitoring gabungan. Sebagai contoh: KONSEPSI dengan SAPA (Ford Foundation) dan Kehati; Konsorsium (Mitra ACCESS) dengan SAPA (Ford Foundation) dan Labsite (PNPM); SANTAI dan JMS (Mitra ACCESS) dengan Labsite (PNPM); ASPPUK dengan PNPM-MP dan Berugak Desa (Mitra ACCESS) dengan Pokja AMPL dan P2K.

- Integrasi nilai-nilai, strategi, kerangka kerja, metode dan alat-alat telah terbukti menyediakan sebuah motivasi yang kuat kepada mitra, yang dapat melihat bagaimana setiap bagian Program dapat cocok satu dengan lainnya.

6 Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan salah satu pilar utama dari AIPCS 2008-2013. Kontribusi ACCESS Tahap II terhadap keberlanjutan dijelaskan didalam Tabel 3.

Table 3: Faktor Yang Mendukung Keberlanjutan Program ACCESS Phase II

Key Feature	Contribution to Sustainability
Working to enrich government systems and processes	ACCESS Phase II has been integrating with government systems to support LG to be able to unify planning, management, and financing for development and poverty alleviation and ensure that resources are effectively and efficiently allocated targeting the disadvantaged. The core to sustainability lies in sectoral programs and specific projects working in villages and their ability to align themselves with these systems and processes.
Asset Based approach	The Asset-Based approach recognises the strengths, talents and resources of individuals and communities, and helps communities to mobilise and build on these for sustainable development. By focusing on assets and capacities, rather than needs and deficiencies, energy is directed toward opportunities at the community level, while remaining conscious of how the policy environment could be changed to further strengthen citizens' capacity to drive their own development. At its core are the various assets (personal, associational, institutional, physical, financial and cultural) that already exist in the community that mobilise assets and strengthen the social relationships that are important for bridging lokal initiatives to external opportunities.
Capacity Building	ACCESS Phase II approach to capacity building contributes to improved sustainable outcomes because the capacity building is focused on the strategic vision of the organizations involved and there is a commitment on the part of the CSO to institutionalize the learning for performance enhancement. The capacity building on ACCESS is community-oriented and promotes wider participation with a range of stakeholders, particularly women and the poor. ACCESS does not want to provide "training for the sake of training" but rather to build

Key Feature	Contribution to Sustainability
	mechanisms that will promote continuous learning for the partner organisations.
Engagement that builds trust	ACCESS is working to ensure there are systems of engagement between stakeholders, in particular between government and citizens and citizen organisations that builds trust and enables full participation in the democratic process.
Donor harmonisation	ACCESS actively tries to identify opportunities for cooperation with other programs, particularly those working in the same geographic location, to build synergies, coordinate approaches and to avoid any significant over-lap of aid. ACCESS also promotes shared learning with other programs as a way of improving aid effectiveness and more sustainable development.
Community-led	The ACCESS Phase II strategy of transferring the locus of power from the donor to lokal CSOs encourages and promotes ownership and in turn more sustainable development outcomes. ACCESS provides space and opportunities for lokal CSOs to take ownership and responsibility for the district vision. The district planning process and resulting actions helps to build a common vision of lokal democratic governance and the contribution of individual actors to this shared vision.

Tabel 4: Faktor Yang Mendukung Keberlanjutan Program ACCESS Phase II

Fitur Penting	Kontribusi terhadap Keberlanjutan
Bekerja untuk memperkaya proses dan sistem pemerintah	ACCESS Tahap II telah mengintegrasikan sistem pemerintah untuk membantu LG agar mampu menyatukan perencanaan, manajemen, dan keuangan bagi pembangunan dan pengurangan kemiskinan dan memastikan bahwa sumber daya teralokasikan secara efektif dan efisien menysasar kelompok-kelompok terpinggirkan. Kunci keberlanjutan terletak di program-program sektoral proyek khusus yang bekerja di desa dan kemampuan mereka dengan proses dan sistem ini.
Pendekatan Berbasis Aset	Pendekatan Berbasis Aset mengenal kekuatan, bakat dan sumber daya individu dan masyarakat, dan masyarakat untuk memobilisasi dan mengembangkannya bagi pengembangan yang berkelanjutan. Dengan terfokus pada aset dan kapasitas, daripada terfokus pada kebutuhan dan kekurangan, energy diarahkan pada kesempatan ditingkat masyarakat, sementara itu tetap sadar pada bagaimana lingkungan kebijakan dapat berubah untuk menguatkan lebih jauh kapasitas masyarakat ntuk mengendalikan pengembangan mereka sendiri. Utamanya berbagai aset (personal, asosiasi, lembaga, bersifat fisik, keuangan dan budaya) yang telah ada didalam masyarakat yang

Fitur Penting	Kontribusi terhadap Keberlanjutan
	menggerakkan aset dan menguatkan hubungan social yang penting bagi menjembatani inisiatif lokal hingga kesempatan dari luar.
Pengembangan Kapasitas	Pendekatan ACCESS Tahap II terhadap pengembangan kapasitas menyumbang pada meningkatnya capaian yang berkelanjutan diakrenakan pengembangan kapasitas terfokus pada visi strategis dari organisasi yang terlibat dan terdapat komitmen dibagian CSO untuk melembagakan pembelajaran guna peningkatan prestasi. Pengembangan Kapasitas di ACCESS adalah berorientasi masyarakat dan mempromosikan partisipasi yang lebih luas bersama dengan berbagai stakeholders, khususnya perempuan dan kaum miskin. ACCESS tidak ingin menyediakan “pelatihan demi pelatihan” tetapi lebih untuk mengembangkan mekanisme yang akan mempromosikan pembelajaran yang berkelanjutan bagi organisasi mitra.
Interaksi dinamis yang membangun kepercayaan	ACCESS bekerja untuk memastikan bahwa sistem interaksi dinamis diantara para stakeholder, khususnya diantara pemerintah dan organisasi warga yang membangun kepercayaan dan memungkinkan partisipasi penuh didalam proses demokratis.
Harmonisasi Lembaga Donor	ACCESS secara aktif mencoba mengidentifikasi kesempatan bagi kerjasama dengan program lainnya, khususnya program yang bekerja di lokasi geografis yang sama, untuk membangun sinergi, mengkoordinasikan pendekatan dan menghindari berbagai bentuk bantuan yang over-lap. ACCESS juga memdorong untuk berbagi pembelajaran dengan program lainnya sebagai cara meningkatkan efektifitas bantuan dan pengembangan yang lebih ada keberlanjutannya.
Dipimpin oleh masyarakat	Strategi ACCESS Tahap II tentang transfer focus kekuatan dari lembaga donor ke CSO lokal mendorong dan mempromosikan rasa kepemilikan dan pada akhirnya capaian pengembangannya akan lebih dapat berkelanjutan. ACCESS menyediakan ruang dan kesempatan bagi CSO lokal untuk mengambil tanggung jawab dan kepemilikan terhadap visi kabupaten. Proses perencanaan kabupaten dan aksinya membantu membangun visi bersama tentang tata pemerintahan yang demokratis dan sumbangan dari pelaku pribadi terhadap visi bersama tersebut.

7 Isu-isu Lintas Program (Cross-cutting Issues)

7.1 Kesetaraan Gender

Program terus tekun didalam memperdalam kesadaran gender dari mitra-mitra CSO selama masa pelaporan melalui artikulasi yang terus-menerus tentang kesetaraan gender sebagai sebuah nilai Program diseluruh kegiatan termasuk penilaian social, pembuatan proposal, pelatihan OM dan lokakarya MEL dengan mitra. Seluruh bahan-bahan lokakarya menyertakan gender dan seimbang didalam gender dan sedang dicapai di semua kegiatan sebagai contoh, 52% partisipasi perempuan didalam lokakarya CSI dan 44.6% partisipasi perempuan didalam penilaian masyarakat. Semua project proposal dinilai pada dimensi penyertaan gender dan sosialnya, termasuk diantaranya apakah terdapat indicator tertentu terkait dengan peningkatan partisipasi perempuan dan kaum miskin. [Komentar dari perempuan (lihat dibawah) selama studi Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan melalui dana hibah inovatif masa pelaporan ini mengungkapkan bagaimana mereka menciptakan perubahan didalam masyarakat mereka.

“Saya menjadi semakin sadar bahwa perempuan harus berani untuk terlibat didalam kegiatan seperti ini. Selama ini orang selalu berkata bahwa perempuan tidak dapat berpikir karena mereka tidak memiliki pengetahuan seperti halnya laki-laki. Tetapi hari ini pada kenyataannya semua perempuan dapat berbicara keras dengan pengetahuan yang mereka miliki. Saya berharap kita dapat memfasilitasinya dengan kegiatan seperti ini” (Ibu Ester Lende, Desa Manukuku, Sumba Barat)

Perubahan juga diperhatikan oleh pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam komentar Umbu Maramba Memang, Camat, Nggaha Ori Angu, di Sumba Timur:

“Ketika saya mengikuti proses penilaian yang dilakukan oleh YCM dan Koppesda, saya terkejut dan merasa gembira melihat perempuan berani berbicara dan bersikap kritis. Mereka bicara tentang hak-hak dasar mereka. Saya merasa senang dengan proses ini dan cara fasilitator memberikan kesempatan dan motivasi bagi perempuan untuk berbicara”.

ACCESS mendanai sebuah studi untuk mengumpulkan informasi dan memperdalam pemahaman tentang bagaimana cara terbaik untuk mengasuh dan memunculkan pemimpin perempuan ditingkat desa dan kabupaten. Studi ini, dilaksanakan oleh Kapal Perempuan menguji capaian dan dampak strategi dari ACCESS Tahap I bagi kepemimpinan perempuan dan pembelajaran untuk Tahap II. Sementara belum diselesaikan, sebagian dari pembelajaran yang muncul dari studi tersebut diantaranya:

- Desentralisasi telah menciptakan sebuah arena baru bagi kelompok-kelompok perempuan untuk berpartisipasi didalam proses pembuatan keputusan ditingkat masyarakat dan kabupaten.
- Sistem pemilihan secara langsung menyediakan kesempatan baru bagi perempuan untuk mempromosikan dirinya didalam bidang politik.
- Program pengurangan kemiskinan pemerintah telah menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk berlatih melalui ACCESS untuk dibayar sebagai fasilitator lokal.
- Sementara ACCESS telah menguatkan kapasitas pemimpin perempuan ditingkat masyarakat dan dibidang ekonomi dan politik, factor budaya dan agama masih menjadi hambatan.

- Partisipasi perempuan yang meningkat belum diartikan bahwa prioritas mereka sudah diakomodasi didalam rekomendasi bagi *Musrenbangdes*.
- Media masa dianggap penting didalam mempengaruhi perspektif publik tentang kepemimpinan perempuan tetapi hal ini belum digunakan dengan baik oleh kelompok-kelompok CS.

Hasil akan digunakan oleh ACCESS Tahap II untuk menyusun strategi Kepemimpinan Perempuan.

Reputasi keahlian ACCESS tentang pengarus-utamaan gender terus diakui oleh stakeholder Pemerintah Propinsi dan kabupaten. Kantor ACCESS propinsi NTB telah diundang untuk berkontribusi pada agenda Gubernur NTB untuk menguatkan peran PKK dalam pembangunan daerah. Di Kupang, sebagai bagian dari Peringatan Hari Pangan dan Anti Kemiskinan, kantor ACCESS propinsi NTT diundang untuk berkontribusi pada Kampanye propinsi pada pertengahan Oktober untuk mempromosikan peran perempuan didalam memberantas kemiskinan.

7.2 Lingkungan Hidup

Manajemen ACCESS Tahap II telah membuat Environmental Management Plan (EMP) bagi Program yang berdasarkan pada [Environmental Management Guide for Australia's Aid Program](#) dan AusAID's Kebijakan Lingkungan Hidup (Environmental Policy). Arah utama dari AusAID's Environmental Policy adalah untuk memastikan bahwa program yang didanai oleh AusAID member kontribusi positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi berbagai potensi dampak merugikan bagi lingkungan hidup. Manajemen dan staf ACCESS Tahap II berkeinginan untuk mengelola seluruh aspek Program didalam cara-cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dari waktu-kewaktu.

EMP⁷ ACCESS Tahap II terfokus pada ukuran yang dilaksanakan oleh Program dan mitra ACCESS Tahap II untuk:

- (i) Mematuhi seluruh kebijakan relevan AusAID tentang lingkungan hidup, dan seluruh peraturan tentang lingkungan hidup baik yang berada di Australia maupun di Indonesia;
- (ii) Meminimalisir penggunaan energy, air dan sumber daya material lainnya;
- (iii) Mendorong pengurangan sampah;
- (iv) Berusaha sekuat tenaga bagi peningkatan terus-menerus didalam manajemen lingkungan hidup kita; dan
- (v) Mengkomunikasikan komitmen lingkungan hidup kita kepada para mitra strategis kita, boundary partners dan stakeholder lainnya.

Kepatuhan staf pada EMP ACCESS Tahap II dinilai selama audit Keamanan dan Kesehatan Kerja (Occupational, Health and Safety (OHS)) yang dilaksanakan setiap tahunnya di kantor Bali dan kantor Propinsi. Selama masa pelaporan ini, audit OHS diselenggarakan di tiga Kantor Propinsi (Kupang, Sumba dan Bima) dan Kantor Bali oleh Project Manager IDSS ditemani oleh Program Coordinator. Tidak terdapat keluhan penting yang dapat diidentifikasi. Audit tersebut menemukan bahwa kantor ACCESS menjalankan ukuran-ukuran kesuksesan dalam mengurangi sampah dan energy, seperti halnya:

- Tidak menggunakan 'aqua' gelas lagi (yang dapat dibuang, satu gelas aqua yang populer di Indonesia) dan menggantikannya dengan gelas dan 19 liter botol air dengan dispenser untuk kepentingan pertemuan didalam kantor. Seluruh Kantor

⁷ Seelumnya diajukan kepada AusAID pada bulan April 2007 selama Tahap Permulaan

Propinsi mendorong mitra ACCESS untuk melakukan kebijakan yang sama dikantor mereka dan di proyek mereka.

- Semua kantor didorong melakukan daur ulang dengan memisahkan sampah dan beberapa kantor seperti di Sumba memiliki ide dan cara unik untuk mengurangi penggunaan air, seperti halnya mengumpulkan dan mendaur ulang air dari unit air-conditioning untuk menyirami kebun kanotr.
- Seluruh kantor telah memasang pengumuman peringatan untuk pelestarian energy dan air diatas saklar lampu dan disekitar penggunaan air seperti halnya di dapur dan kamar mandi.
- Seluruh kantor menggunakan printer (mesin cetak) yang dapat memakai kertas bekas dan staf telah melaksanakan kebijakan didalam menggunakan kertas daur ulang untuk cetakan draft didalam kantor.



Dari sisi program, semua mitra ACCESS Tahap II diminta untuk memecahkan potensi masalah dampak lingkungan sebagai bagian dari proposal pendanaan mereka dan bagaimana dampak tersebut secara efektif akan dikelola merupakan sebuah perangkat criteria penilaian atas proposal tersebut. Ketika sebuah proposal memiliki focus lingkungan hidup secara khusus, ACCESS akan melibatkan ahli dari luar untuk mengambil bagian didalam panel penilaian.

Salah satu focus wilayah yang akan disasar ACCESS, pendanaan akan melalui program dana hibah adalah didalam Manajemen Sumber Daya dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan yang Dipimpin oleh Masyarakat. Dua PGA telah ditandatangani di masa pelaporan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penurunan lingkungan hidup, mengurangi kerusakan lingkungan asli dengan cara eksploitasi yang tidak hati-hati, dan membangun ekonomi yang baik melalui penggunaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Yang pertama adalah PGA dengan Asosiasi Lembayung di Lombok Tengah untuk melaksanakan sebuah program kehutanan masyarakat yang berkelanjutan di hutan Mareje Bonga Lestari. PGA yang lain adalah dengan Aliansi Masyarakat Turatea di Sulawesi Selatan untuk mendanai proyek 'Jeneponto Green and Clean' bertujuan untuk memunculkan kesadaran lingkungan, menggabungkan pengetahuan lokal kedalam manajemen lingkungan dan menyediakan kesempatan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

7.3 Anti Korupsi

ACCESS Tahap II terus melaksanakan Fraud Control Plan dan anti corruption yang sesuai dengan [Australian Indonesia Partnership Anti-Corruption for Development Plan 2008-2013](#) dan [AusAID Tackling Corruption for Growth and Development – Anti-corruption Policy](#), 2007. Prinsip-prinsip panduan ACCESS tentang transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan didalam operasional ACCESS sendiri, seperti yang dibuktikan didalam Panduan Operasional Program (Program Operations Handbook) dan Manual Manajemen Lapangan (Field Management Manual). Transparansi dan akuntabilitas juga secara aktif dipromosikan mitra kami, seperti yang dibuktikan didalam Manual Keuangan CSO untuk penerima dana hibah, Panduan Keuangan bagi Mitra Strategis dan berbagai pelatihan dan sosialisasi bagi mitra ACCESS yang dilaksanakan sebagai bagian program pendanaan.

“I see ACCESS as very open and transparent. If I had to choose I would choose the ACCESS way to do grant appraisals. ACCESS could do this in a shorter time by doing it internally. Indeed the time is longer, but the results are maxmised. Great! I really like the process”.
(Primus Niki Babys, Coordinator and District Facilitator, PNPM, East Sumba)

“All stakeholders are involved, everyone knows about the program we are doing and the budget we manage. PNPM, AIP-MNH, PEMDA, village governments, villagers and other partners know about the program and budget. Usually only the donors and the grant recipients know about the program and the budget.”
(Director, YCM and coordinator for Tim Kolaborasi 1)

Selama masa pelaporan ini, Program Director menghadiri Pertemuan Team Leader AusAID pada bulan Agustus 2009, dimana AusAID menyajikan tentang tanggung jawab agen pelaksana terhadap persoalan kecurangan. AusAID member ACCESS ijin untuk menggunakan presentasi dengan staf ACCESS pada CLM tiga bulanan yang diselenggarakan

pada bulan September 2009 untuk memperkuat pesan mengenai tanggung jawab ACCESS didalam mendeteksi dan melaporkan berbagai kejadian yang dicurigai sebagai kecurangan, baik secara internal maupun dengan mitra.

Koordinator Program terus mengirimkan laporan bulanan Financial Irregularities kepada AusAID Activity Manager yang menjelaskan tahapan yang diambil didalam berbagai potensi kasus kecurangan. Saat ini tidak terdapat kasus kecurangan yang dilaporkan. Kasus kecurangan dengan Office Manager sebelumnya secara resmi ditutup masa pelaporan ini dikarenakan Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menindaklanjuti permasalahan di pengadilan dan AusAID menerima alasan ini.

Audit Mitra Strategis diadakan masa pelaporan ini dengan audit pertama terhadap Yappika dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober selama lima hari. Audit terhadap Mitra Strategis dengan PGA akan diadakan selama masa pelaporan berikutnya. Audit terhadap mitra CSO diharapkan akan diadakan pada masa pelaporan berikutnya.

Tim keuangan ACCESS menyelenggarakan pelatihan keuangan dengan mitra yang menandatangani PGA selama masa pelaporan ini, termasuk dua mitra di NTB, enam mitra di Sulsel dan dua mitra di NTT. Selama sesi ini, mitra diberi penjelasan lengkap mengenai tanggung jawab mereka tentang AusAID's Fraud Policy dan ukuran-ukuran anti korupsi ACCESS.

Tabel 5: Peserta pada Pelatihan Keuangan ACCSYS

Peserta Pelatihan Refresher ACCSYS 08		
Nama Mitra	Perempuan	Laki-laki
Yasko	1	3
Jaringmas	1	2
Yajalindo	1	2
GP3A	2	4
AKUEP	3	0
Mitra Turatea	2	5
PMD	1	
Total	11	16

Tim Keuangan ACCESS menghadiri dua hari pelatihan refresher bagi enam mitra di Sulawesi Selatan dalam hal penggunaan paket akuntansi sederhana ((ACCSYS 08) yang memungkinkan CSO melakukan pelaporan multi donor. Sistem ini dilaksanakan pertama kali selama masa peralihan ACCESS Tahap I dan sedang diujicobakan di Sulawesi Selatan. Sistem ini mendorong meningkatnya transparansi dan akuntabilitas didalam pelaksanaan akuntansi dan mencegah kejadian umum dari pembukuan ganda (*double book-keeping*) yang dilakukan oleh banyak LSM di

Indonesia. Satu anggota dari PMD di Sulawesi Selatan juga menghadiri pelatihan karena terdapat ketertarikan dari Pemerintah Daerah didalam penggunaan sistem itu juga.

7.4 Kemitraan

Isu lintas Program AusAID tentang kemitraan, seperti yang dijelaskan didalam AIPCS 2008-2013 berkaitan dengan Program Pengembangan Australia bekerja didalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia untuk membantu capaian pembangunan mereka dan menanggapi fleksibilitas terhadap kebutuhan orang Indonesia dan konteks kebijakan. Hal ini dijalankan melalui:

- Membantu Indonesia dalam menggunakan sistem dan sumber daya mereka sendiri secara lebih efektif lagi;
- Secara aktif melibatkan CS untuk menguatkan partisipasi publik didalam proses demokrasi dan perubahan kebutuhan, dan
- Harmonisasi donor untuk meningkatkan efektifitas bantuan.

ACCESS tahap II menanggapi secara langsung terhadap tiap prioritas ini seperti yang dicerminkan didalam capaian Program bagi masa pelaporan enam bulanan. ACCESS tahap II siap bekerja melalui sistem dan prosedur GOI disegala tingkat. Pengembangan dari kegiatan kami berdasarkan pada analisa mendalam tentang peraturan ditempat dan/ atau kebutuhan akan peraturan baru ditingkat lokal apabila peraturan yang relevan belum ada. Sebagai contoh, belakangan ini kenyataan bahwa meskipun pada tingkat nasional terdapat hukum dan surat keputusan yang mengatur tentang perencanaan (dan partisipasi dari berbagai stakeholder berbeda didalam proses perencanaan), seringkali ditemukan bahwa peraturan tingkat nasional ini tidak ditransformasikan kedalam aksi lokal. ACCESS mendukung pengembangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran dan penyampaian pelayanan publik yang utama dengan tujuan memastikan partisipasi warga dan organisasinya secara penuh didalam sistem tata pemerintahan yang demokratis. Kontribusi kita terhadap sistem, prosedur dan proses merupakan dua sisi:

1. **Memperkaya proses yang perlu ada guna memastikan bahwa sistem dan prosedur dilaksanakan didalam prinsip-prinsip tata pemerintahan yang demokratis.** Merupakan satu hal untuk memiliki surat keputusan tentang partisipasi didalam perencanaan tetapi hal lain adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses ini sesuai dengan peraturan. Dengan berinteraksi dengan Pemerintah Daerah dan menunjukkan perilaku pintar, Pemerintah Daerah mengumpulkan sejumlah isu penting yang perlu untuk pelaksanaan peraturan dengan sukses sebagai contoh, meyakinkan terdapat fasilitator desa begitu pula ketersediaan dana guna memastikan terdapat proses partisipatif didalam pembuatan keputusan dan perencanaan. Apabila tidak didukung oleh keputusan keputusan dari Bupati atau surat keputusan pemerintah daerah, tidak mungkin pendekatan tersebut dapat berkelanjutan. Pada bab sebelumnya dari laporan ini kami memberikan sejumlah contoh yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sangat menghargai kontribusi ini sebagai contoh, Pemerintah Daerah menggerakkan sumber daya guna memastikan bahwa proses diperkaya, dan Pemerintah Daerah mengambil pendekatan didalam perencanaan dan penganggaran serta didalam penyampaian pelayanan publik dsb.
2. **Memastikan bahwa terdapat pemain lapangan dari Pemerintah Daerah, masyarakat sipil dan kelompok lainnya yang memiliki pengetahuan dan keahlian , dan juga hidup dengan nilai dan prinsip-prinsip tentang masyarakat yang lebih demokratis.** ACCESS Tahap II – melalui mitra CSnya di 16 kabupaten – melatih orang untuk mampu memfasilitasi proses, untuk melihat pada tantangan pembangunan dari sudut pandang yang berbeda dan

untuk memastikan bahwa kegiatan multi stakeholder membangun kepercayaan yang diperlukan bagi orang dari berbagai latar belakang untuk tetap berinteraksi dalam cara-cara yang positif antara satu dengan yang lainnya. Sejumlah kegiatan ACCESS dan mitra CSO kita seperti halnya lokakarya DCEP, pelatihan dan program pertukaran dan pelatihan gabungan dengan lembaga pemerintah merupakan bukti dari hal ini.

8 Manajemen Resiko

Tidak terdapat resiko utama yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Program selama masa pelaporan ini. Sejumlah resiko tingkat rendah diidentifikasi, seperti yang dijelaskan didalam Tabel 5.

Tabel 6: Resiko yang diidentifikasi Mei-Oktober 2009

Resiko	Potensi Dampak	Ukuran Manajemen
Mitra tidak mampu menerapkan alat dan pendekatan berbasis kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Program akan kurang • CLAPP+++ tidak akan cukup terfokus 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Mitra Strategis untuk menyediakan tambahan pelatihan CB • Mentoring tambahan dan bantuan TA dari Staf ACCESS • Alih bahasa terhadap SBA Tool Kit bagi mitra
Resistensi terhadap perubahan dari mitra ACCESS untuk melakukan sesuatu hal 'secara berbeda'	<ul style="list-style-type: none"> • Aset lokal tidak digunakan secara efektif • Menggunakan paradigma lama terhadap pengembangan dimana terfokus pada proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Staf ACCESS diberitahu alasan atas resistensi dan strategi manajemen • Membantu mitra didalam menciptakan konsistensi dan pendekatan praktis • Penguatan terus-menerus tentang apa yang kita lakukan dan mengapa
Stakeholder memandang DCEP sebagai sebuah agenda ACCESS	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya rasa kepemilikan didalam visi dan misi kabupaten • Stakeholder akan menunggu ACCESS untuk mencoba bertindak • Keberlanjutan yang lemah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu didalam menyediakan kejelasan mengenai peran DCEP • Mendorong rasa kepemilikan yang kuat didalam proses • ACCESS menguatkan kebutuhan akan prestasi yang sangat berkualitas sebagai hak kaum miskin atas pelayanan yang lebih baik • Berbagi pembelajaran program kepada audien yang lebih luas
Divisi politik diantara pegawai pemerintah ditingkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi bagi ACCESS untuk 'ditangkap' oleh faksi tertentu, yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bantuan dasar yang luas dari pemerintah

Resiko	Potensi Dampak	Ukuran Manajemen
	memiliki implikasi bagi mitra yang melaksanakan program	<ul style="list-style-type: none"> • Staf ACCESS menyediakan perkembangan baru program secara terus-menerus kepada pegawai pemerintah didalam pertemuan koordinasi • ACCESS mendorong mitra untuk berinteraksi dinamis secara langsung dengan pemerintah
Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dengan kontribusi pemerintah kepada proyek mitra CSO ACCESS	<ul style="list-style-type: none"> • Dana tidak dikirimkan atau tertunda • Mitra tidak mampu melaksanakan sebagian dari program mereka • Ketidakpuasan penerima manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi disetujui sebagai bagian dari Technical Arrangements dengan Pemerintah • Rekanan pemerintah menandatangani PGA dengan mitra CSO • Mendorong keterlibatan aktif pemerintah didalam monitoring program
Lambatnya pemakaian pendekatan ACCESS di kabupaten baru	• Penundaan didalam pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisasi dengan berbagai stakeholder yang luas • Staf ACCESS agar proaktif membangun hubungan di kabupaten baru • Memperkuat keputusan yang dibuat oleh pelaku lokal yang mendukung prinsip-prinsip ACCESS
Anggaran dana hibah tidak secara penuh dikururkan FY 2009-2010 sebagai akibat dari nilai pertukaran naik dan penundaan didalam proyek proposal	• Anggaran Rencana Tahunan akan dibelanjakan dibawah dari yang semestinya	<ul style="list-style-type: none"> • Bila memungkinkan, majukan perencanaan • Mendiskusikan strategi potensial dengan AusAID Activity Manager

9 Manajemen Program

Seluruh dokumen Manajemen Program, termasuk Panduan Operasional Program, Manual Manajemen Lapangan dan Manual Operasional Dana Hibah direview dan diperbaharui selama masa pelaporan berdasarkan pada pengalaman pelaksanaan selama masa enam bulan sebelumnya.

Seluruh Milestones dan laporan yang secara kontrak diperlukan masa pelaporan ini (lihat Lampiran 5) telah diajukan kepada AusAID tepat waktu dengan permintaan revisi yang minimal.

Manajemen Program terus tanggap dan fleksibel terhadap permintaan dari AusAID, mitra ACCESS dan stakeholder lainnya.

9.1 Pengisian Staf Program

Saat ini ACCESS mempekerjakan 40 orang staf lokal, termasuk 14 staf yang berada di Bali dan 26 staf yang berada di Propinsi. Selama masa pelaporan, dua orang Provincial Secretaries direkrut untuk kantor Bima dan kantor Kupang dan Monitoring, Evaluation and Learning Senior Technical Officer (MEL-STO) baru juga direkrut setelah kontrak bagi MEL-STO sebelumnya tidak diperbaharui oleh Program. Seluruh staf baru telah dimasukkan kedalam Program dan telah menyatu dengan baik.

Bruce Bailey, MIS Short Term Advisor (STA), menyelesaikan 14 hari masukan di bulan Agustus dan September 2009 menyelesaikan database MIS ACCESS, ERSULA II.

I Nyoman Oka memulai peran STA-nya di bantuan perencanaan dan penganggaran desa. Masukan pertamanya pada bulan Oktober 2009 adalah untuk menyusun sebuah strategi dan rencana TOT yang akan menghasilkan sekelompok fasilitator lokal dari CSO dan/atau masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan pelatihan kader pengembangan masyarakat ditempat dimana telah diselenggarakan pengembangan fasilitator. Kerja ini akan terus berlanjut hingga masa pelaporan berikutnya.

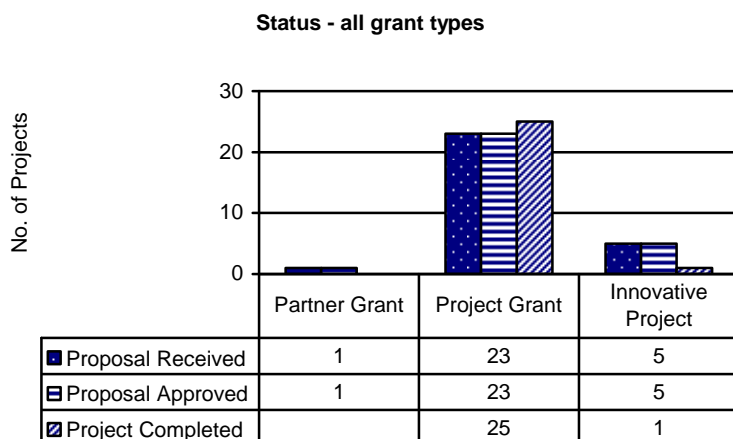
Chris Dureau memulai peran STA-nya didalam bantuan Asset Based Community Development selama masa [elaporan, termasuk tiga hari untuk menyusun Strength Based Approach Toolkit untuk digunakan staf dan mitra ACCESS.

9.2 Manajemen Dana Hibah

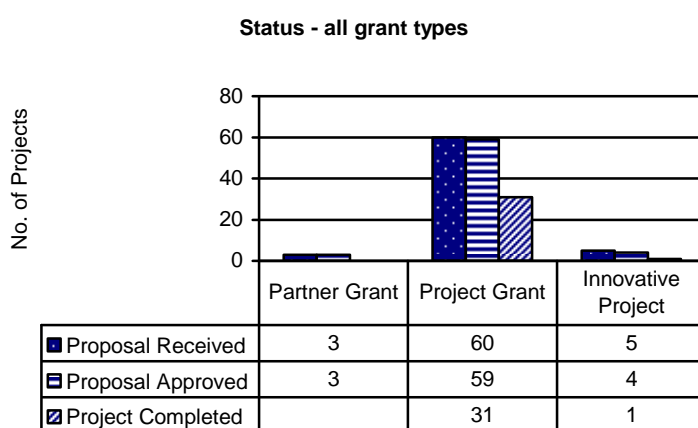
9.2.1 Grants Processing

Selama masa pelaporan, 29 proposal telah diterima dan disetujui, dan 26 proyek telah diselesaikan (termasuk proyek yang PGA nya dikeluarkan pada masa pelaporan sebelumnya). Gambar 3 dan 4 menyediakan penjelasan mengenai proses dana hibah melalui jenis dana hibah. Lampiran 6 memuat penjelasan lebih detil mengenai seluruh proposal yang diterima, disetujui dan diselesaikan selama masa pelaporan.

Dalam hal PGA yang dikeluarkan pada masa pelaporan ini, 29 proposal telah disetujui, 29 PGA telah dikeluarkan dengan 22 diantaranya telah ditandatangani oleh mitra (lihat Tabel 6). Untuk tujuh PGA sisanya, ACCESS masih menunggu kesepakatan untuk dikembalikan ke kantor ACCESS. Hal itu diharapkan dapat sampai dikantor selama minggu pertama bulan November. .



Gambar 3: Proses Dana Hibah untuk masa Mei-Oktober 2009



Gambar 4: Proses Dana Hibah untuk Period Project hingga Saat ini

Tabel 7: PGA yang dikeluarkan untuk Masa Mei-Oktober 2009

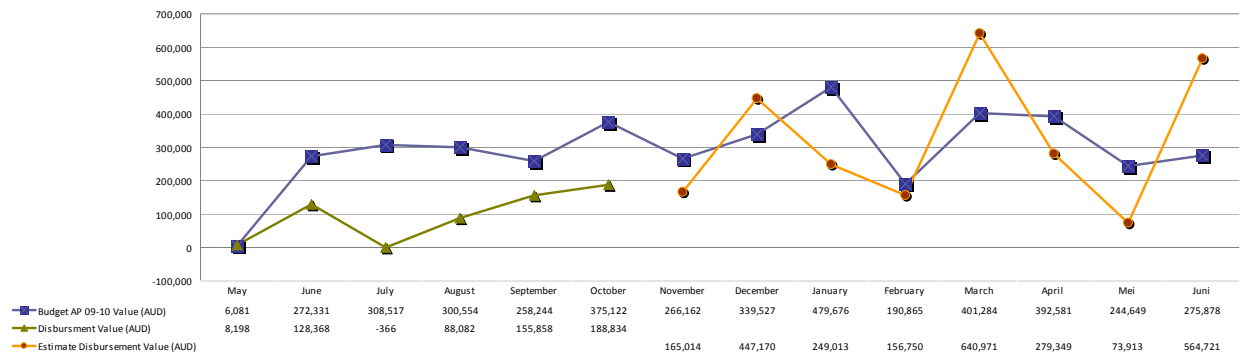
Partner Grants		Project Grants		Innovative Grants	
PGAs issued	1	PGAs issued	23	PGAs issued	5
PGAs signed	1	PGAs signed	17	PGAs signed	4

9.2.2 Pembelanjaan Dana Hibah

Sementara Program berada di jalur yang semestinya untuk membelanjakan anggaran dana hibah hingga tahun 2013, terdapat pengeluaran dibawah dari anggaran Trust Account untuk masa Mei hingga Oktober 2009 (lihat Gambar 5) dengan total pengeluaran \$568,974. Terdapat dua alasan utama untuk pembelanjaan dibawah yang diharapkan:

- 1 Penundaan yang signifikan dari pengajuan proposal mitra ACCESS untuk persetujuan telah mengakibatkan tertundanya pengeluaran project grant agreements. Tertundanya mitra dalam menyusun proposal menyebabkan penundaan didalam pembuatan Rencana CB kabupaten, sehingga berakibat tertundanya pengeluaran Strategic Partner grant agreements.
- 2 Nilai tukar mencapai 17.78% sejak anggaran rencana tahunan diajukan kepada AusAID pada bulan Maret 2009. Seluruh perencanaan anggaran bagi pembelanjaan dana hibah dilaksanakan didalam rupiah dan selanjutnya dikonversikan kedalam AUD untuk keperluan Rencana Tahunan. Jadi, sebagai dampak disebabkan oleh kenaikan nilai tukar, kita memiliki 17.78% anggaran yang lebih tinggi daripada yang kita antisipasi untuk dibelanjakan.

ACCESS Budget and Disbursement by Monthly as Oct 23, 2009



Gambar 5 Anggaran versus Pembelanjaan

Sementara anggaran bagi masa enam bulan ini pembelanjaannya dibawah yang diharapkan (under spent), diantisipasi bahwa masa enam bulan berikutnya akan memiliki tingkat pengeluaran dana yang lebih tinggi (lihat Gambar 5) karena sisa proposal bagi dana hibah proyek diajukan untuk persetujuan, dan Mitra Strategis ditunjuk. Pengeluaran dana hibah yang memperkirakan pembelanjaan untuk masa enam bulan berikutnya disertakan didalam Lampiran 4.

Appendix 1: Glossary of Terms

- Boundary Partners** : Lokal CSOs who share the values promoted by ACCESS Phase II and who are primarily focused on shifting power relations to create greater social and gender equity in lokal development impacts. Based on the results of the District Citizens Engagement Plan (DCEP), these organisations will be committed to actively addressing the issues facing the district by engaging with individuals, citizens' organisations and their networks, with Lokal Government and with other parties interested in lokal democratic governance. ACCESS Phase II supports these organisations by creating space and providing opportunities to reflect, to learn, to act in order to improve performance. ACCESS Phase II negotiates directly with these organisations to determine the kinds of behaviour they want/need to influence externally and how they want to change internally in order to affect this change. ACCESS Phase II will support directly through organisational and individual capacity building and grants for activities that match Program criteria in line with its guiding principles.
- CSO** : Civil Society Organisations (CSOs) are organized groups or associations which are separate from both the state and the market, enjoy some autonomy in relations with the state and are formed (voluntarily) by members of society to protect and extend their interests, values or identities. Unless specified otherwise in this document, in the context of ACCESS Phase II CSOs include NGOs, CBOs and other member organisations.
- District-wide** : Includes village, sub-district and district level.
- Grantee** : An organisation or individual who receives a Partner or Project Grant Agreement from ACCESS Phase II, funded from the ACCESS Phase II Grant Fund Imprest Account. This includes recipients of Partner, Project, and Innovative Grants.
- New districts** : These are the additional eight districts that have been agreed to for Phase II and include Kabupaten Kupang and Kabupaten TTS (NTT), Kabupaten Bima and Kabupaten Dompu (NTB), Kabupaten Takalar and Kabupaten Gowa (Sulsel), Kota Bau Bau and Kabupaten Buton Utara (Sultra).
- Old districts** : These include the original target districts from Phase I: West and East Sumba (NTT); West and Central Lombok (NTB), Jeneponto and Bantaeng (Sulsel); Muna and Buton (Sultra).
- Strategic Partners** : Organisations with specialist expertise selected for their proven track record to assist with Program

implementation. They will work with ACCESS Phase II and its Boundary Partners through providing technical support, training and mentoring to the Boundary Partners to develop capacities, conduct research and baseline data and produce learning materials in support of the Program's overall objectives. They will also assist the ACCESS Phase II Boundary Partners in accessing key networks and actors operating at the provincial and national levels.

Target districts : The 16 districts in which ACCESS Phase II has been mandated to work.

Ultimate Beneficiary Partners: The Ultimate Beneficiary Partners are those with whom our Boundary Partners interact to bring about improved democratic governance, including citizens, particularly women and poor marginalized groups, and local and national governments.

Appendix 2: Progress Monitoring Matrix

Functional Area 1 Output: ACCESS is implementing and updating its systems and guidelines for effective resourcing and program administration		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
Program Operations Handbook (POH) and Program Strategic Framework updated annually to respond to environmental changes and lessons learned	Revision of FMM and POH	POH was updated based on changes in the Annual Plan and implementation progress. ACCESS Program Strategies were updated based in implementation experience.
Usage of upgraded ACCESS Website	Monthly update of Ersula and website	Website was updated monthly. 122,914 hits were recorded on the website
	Preparation and submission of Annual Plan	<i>Not planned this reporting period</i>
Quality reports to AusAID are delivered in timely manner	Preparation and submission of monthly and 6-monthly reports	All reports submitted to AusAID on time.
Activities to promote good environmental practice internally and with partner CSOs		OH&S audits undertaken for 4 ACCESS offices this reporting period, including assessment on good environmental practices
Activities to promote HIV mainstreaming internally and with partner CSOs		Preparations underway to fund an HIV assessment in the ACCESS districts
Number of grants issued by type		During May-October the following grants by grant types were approved: 1 Partner grant approved 23 Project grants approved 5 Innovative grants approved
	Provincial and head office system audits	An internal systems and financial audit was conducted in July 2009. No non-conformance identified. An external audit was undertaken in June 2009. No non-compliance identified.
	Performance appraisal for all staff	All staff appraised prior to their contract anniversary date. Appraisal forms were lodged with the OM.

Functional Area 2 Output: ACCESS is engaging with CSOs and Lokal Governments to implement the Program		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
	Identify key stakeholders (Lokal Government, CSOs, etc) and undertake stakeholder mapping for new districts Sharing learning from ACCESS experience in old districts for key actors in new districts	Beginning with the Civil Society Index workshops, key actors were identified in all new district and these people encouraged to participate in events such as regular meetings, Seminars, workshops etc, to learn more about ACCESS approaches and key issues related to LDG
	Meetings of embryo DSC in new districts to deepen learning on issues related to LDG	Since the CSI workshops in all the new districts in June/July 2009, regular meetings have been carried out. Meeting topics included: GSI, Community development snapshot tools, ABA/AI, District budget software (training), Basic public services, lokal democratic governance, role, function and criteria of the SC. In Takalar (71 people – 19 women and 52 men) and Gowa (57 people 29 women and 28 men) large meetings were held to formalise the DSC.
	Conduct DCEP workshops in new districts	DCEP workshops carried out in 6 districts with approximately 250 participants from communities, government NGOs and other organisations (50% male and 50% female) by the end of October. In 2 districts (Buton Utara and Kupang) the workshops will be carried out in November 2009. In all the districts appreciative interviews were carried out with 240 people involved (116 women, 124 men)
DSC functioning in 16 districts with CS, Lokal Government and private sector participants	Regular meetings of DSC in old districts to share learning	Meetings have been carried out in all the old districts (at least 4 meetings in the reporting period). Meeting topics have included; Sharing learning on planning process, role of the DSC, quality of public services, participatory planning

Functional Area 2 Output: ACCESS is engaging with CSOs and Lokal Governments to implement the Program		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		and budgeting.
16 DCEP Plans developed in line with ACCESS values and frameworks and annually reviewed	Support DSC to finalise DCEP in new districts	<i>Not planned this reporting period.</i> Eight DCEP were developed during the previous reporting periods in the old districts
	Market results of DCEP to other key actors to build support	<i>Not planned this reporting period</i>
	Annual review of DCEP in old districts	<i>Not planned this reporting period</i>

Functional Area 3 Output: ACCESS is building the capacity of CSOs and their networks for LDG improvements		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
	Based on DCEP conduct CB assessments and analyse capacity building requirements in old districts	CB assessments integrated into the Outcome Mapping process for partner Action plans for all partners (23 to date). Information analysed and included in the district and provincial plans.
	Based on DCEP conduct CB assessments and analyse CB requirements in new districts	<i>Not planned this reporting period</i>
	Identify and select potential strategic partners	13 Strategic partners identified through tender process, financial reviews currently underway.
	Issue partner grant agreements	Three PGAs issued for Yappika, Mitra Samya and Inspirit. All others will be issued following financial review. A briefing was held with 11 Strategic Partners in Jakarta on 8 October to explain ACCESS approach and their role.
16 District Capacity Building Plans developed with lokal CSOs	Establish a CB plan per district in old and new districts	CB Plans established for all districts and provinces and amalgamated into ACCESS CB plan 2009-2010. Guidelines and formats developed to assist provincial teams in developing CB plans and budgeting
	Prepare guidelines, methods, and tools to support FA2, FA4, FA5 (DCEP workshop with AI, OM for planning, OM for MEL, Reviewing Kabupaten agendas, Governance in cooperatives/ village economic organizations, etc)	Guidelines developed for DCEP workshop, OM for planning, OM and Assessments and OM for MEL. Innovative grant for developing guidelines in BUM Des currently underway (see FA5)
Number and type of CB activities conducted	Implement CB activities in support of FA2, FA4, FA5	CB activities included OM workshops with partners, MEL workshops with partners and FLA, TOF DCEP with 34 participants (50% women), other CB activities – introduction to CLAPP (Sumbawa), CLAPP revision workshops (49 women and 54 men)

Functional Area 3 Output: ACCESS is building the capacity of CSOs and their networks for LDG improvements		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
Number and % of male/female trainers/facilitators involved in workshops and training activities		33 Facilitators (20 women – 61% and 13 men – 39%) involved in workshops and training events
Number of training days by gender		361 training days for men (54%) and 305 training days for women (46%)
Number of people with improved facilitation skills through ACCESS supported training		3 women and 2 men
Satisfaction rating of participants in CB activities by gender		Highly satisfied: 34% women; 48% men Satisfied: 61% women; 47% men Mostly satisfied: 5% women; 4 % men Not satisfied: 0% women; 0% men
	Coaching and Mentoring to support Boundary Partners' CB activities	Continuous coaching to partners on OM and mainstreaming ACCESS values in developing action plans. TAT provided workshops to all partners in OM frameworks and proposal development
	Identify possible opportunities in the DSC and DCEP action plans where woman and youth at different level can engage more actively on issues of concern	Special emphasis was given during the TOF DCEP on ensuring the full participation of women and youth in developing vision and agendas in new districts. Workshop carried out in South Sulawesi on integrating GSI into action plans. This will be continued in all districts next reporting period.
	Identify potential women and youth leaders and build their capacities	Kapal Perempuan is carrying out a survey on women's leadership as an innovative grant and the results will lead to identification and CB for women leaders. Pilot carried out in Sumbawa to encourage youth to participate in issues related to LDG
	Annual SP meeting post DCEP	<i>Not planned this reporting period</i>

Functional Area 4 Output: ACCESS is supporting the planning and implementation of self directed development efforts		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
	Providing technical assistance on concept paper and assessment proposal writing (old district)	Ongoing technical assistance was provided to all partners by provincial teams on assessment and planning of action plans. Workshops were held, facilitated by TAT to assist partners in the OM framework including developing a baseline (based on ODST) for CB
Number of villages that using revised CLAPP process in each district ⁸		The ten approved action plans will work in 317 villages, 46 BUM Des, 27 water users groups, 9 village economic groups, 71 community centres, 4 youth groups, 20 neighbourhood associations and 120 Village Mid Term Development Planning processes.
Number of lokal facilitators (male and female) trained to facilitate the revised CLAPP methodology in each district		No training for CLAPP+++ facilitators this reporting period
	Providing technical assistance on concept paper and assessment proposal writing (new districts)	<i>Not Planned this reporting period</i>
	Providing lokal management and mentoring support (through ACCESS staff) to lokal CSOs in proposal preparation and appraisal processes	All partners (23) received intensive mentoring in the proposal development process based on the OM planning workshops. Appraisals of project proposals were carried out in the field with participation from partners, beneficiaries and other stakeholders. Valuable feedback was provided both directly and in writing by the panels. Each panel had one government official knowledgeable in the field, one ACCESS staff and one lokal

⁸ This indicator will be revised in the next review of PAMELS based on changes made to FA4 in the Annual Plan

Functional Area 4 Output: ACCESS is supporting the planning and implementation of self directed development efforts		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		expert.
	Grant support for assessment and action planning to boundary partners to ensure that communities are involved in defining the goals, outcomes, and activities that will contribute to their empowerment	27 grants provided for assessments and 3 concept papers being reviewed. Over 4140 community members were involved in these assessment and planning processes as well as government officials from village, sub-district ad district levels
	Provide support and technical assistance to boundary partners for project implementation to ensure that key values are being considered mainstreamed at all levels from beneficiaries to boundary partner	Provincial staff and the Technical Advisory Team in Bali have been providing on-going technical assistance to partners in developing project proposals.
Number of beneficiaries in village level activities by gender and socio-economic status		Data not yet available. As programs are implemented this data will be reported in partner progress reports and M&E data.
Number of grants for village activities issued this period		15 proposals approved, 15 PGAs issued (of which 10 have been signed and returned by partners)
Number and type of projects (by objective markers)		For the Program to date the number and type of projects by progress marker are as follows: <ul style="list-style-type: none"> • ACCESS working with govt and other donors = 2 PGAs • CSO working with citizens = 15 PGAs • CSO working with Govt = 14 PGAs • CSO working with networks = 12 PGAs Note that one PGA may have more than one objective marker
Project grants appraised and approved in timely manner		All Project Proposals received during the reporting period (23) were appraised within a month of receipt.

Functional Area 5 Output:**ACCESS is promoting continuous learning and policy and practice change both internally and externally**

Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
Regular gender and poverty disaggregated data is accumulated and analysis is prepared and discussed with CSO and GOI stakeholder	Inputting data to ERSULA for Grant and CB Activities	Due to the updating of ERSULA, which took the system off-line, ACCESS is now working to address the backlog of data to be inputted.
Changes in Program approaches and policies based on lessons learned	Review and revise guidelines on M&E and reporting for Boundary Partners and staff	To be undertaken next reporting period
Activities to engage stakeholders in ACCESS Phase II M&E activities	Conduct participatory progress and outcome monitoring of grant funded projects on quarterly basis (phased across all partners)	To be undertaken next reporting period. In preparation, MEL workshops were held in 6 districts with the other districts to follow next reporting period.
	Strengthen capacity of district stakeholder committees to analyse and review lokal processes and changes in governance practices and policies	Workshops to develop MEL plans for FLA were conducted in Jeneponto and Bantaeng while discussions were held with FLA in Sumba Barat and Sumba Timur on their role and function as a precursor to developing MEL plans at a later date.
	Revise CDST	<i>Not planned this reporting period</i>
	Undertake monitoring on specific aspects of the CSI with Boundary Partners and DSC (through SPs) in new districts	<i>Not planned this reporting period</i>
Annual DSC review of DCEP	Support DSC to conduct annual review of DCEP in old and new districts	<i>Not planned this reporting period</i>
Action research activities	Collaborate on one research program with an international/national organisation (involving lokal stakeholders)	A doctoral student from Murdoch Uni will be involved in ACCESS community natural resource management projects as part of her doctoral study while an Australian Leadership Awards Scholarship student has included ACCESS

Functional Area 5 Output:

ACCESS is promoting continuous learning and policy and practice change both internally and externally

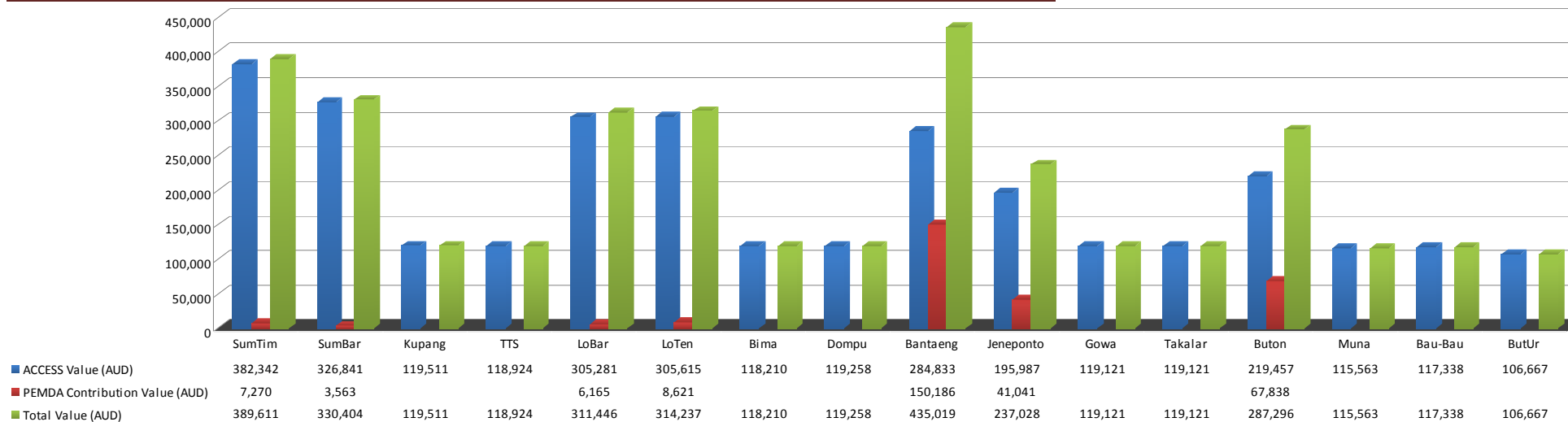
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		experiences in her research on community planning and budgeting
	Manage minimum of four Innovative Grants	Five proposals were received during the reporting period and 4 PGAs have been issued.
Lessons generated from ACCESS Phase II M&E processes are shared with CSO partners, GOI stakeholders and donors	Develop district learning program for regular review and learning meetings/workshops with CSO and Lokal Government partners	This includes meetings with Lokal Government. Each district team also conducted reflection sessions with Partners on the process of action planning while ACCESS Bali sponsored a one day reflection meeting on Outcome Mapping to inform Partner action planning in the new districts.
	Produce 1 edition of ACCESS Bulletin and disseminate to district, provincial and national stakeholders and other donor programs	4000 copies of the ACCESS Bulletin distributed.
	Produce two Good Practice Briefs and disseminate to district, provincial and national stakeholders and other donor programs	To be undertaken next reporting period
	Identify opportunities for collaborating with PNPM at district level and share learning with national level PNPM	Opportunities identified at the Provincial and district levels including attendance by ACCESS staff at PNPM coordination meetings in the districts
Activities to promote replication and scaling up	Identify opportunities to present ACCESS Phase II approaches and results through at least one national and four Provincial Government meetings (with non ACCESS districts where possible)	ACCESS Phase II promoted the Program at an Exhibition at the Eastern Indonesian Forum in Makassar in August 2009, organized by SoFEI. A short presentation on ACCESS was shared at the Asia-Pacific Sociological Association Conference on deliberative democracy in June. The MEL Adviser liaised with the Coordinator for

Functional Area 5 Output:**ACCESS is promoting continuous learning and policy and practice change both internally and externally**

Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		SAPA at Ford Foundation and attended a follow up coordination meeting with LDG and CSOs in Central Lombok.
	Contribute as appropriate to the development and implementation of AusAID PNPM Strategy	ACCESS was invited to provide comment to the design team for the new AIPD program. The Program Director and MEL Adviser have met with AusAID and World Bank PNPM staff to discuss opportunities for collaboration.
	Conduct minimum of 2 presentations to other donors on ACCESS Phase II approaches and results	<i>Not planned this reporting period</i> Although not planned this period, a presentation was made to JICA; NZ AID; and CIDA-BASICS
	Identify at least one opportunity to participate in an independent and external evaluation on democratic governance in Indonesia	<i>Not planned this reporting period</i>

Appendix 3: Grant Allocation by District

Total Value of ACCESS Project & Partner Grant Agreements by District (including Pemda Contribution) as Oct 23, 2009



Appendix 4: Six monthly Funding Estimates

May 2009 - April 2010

Rp8,000

PERIOD		GRANTS TYPE			TOTAL
MONTHS	SEMESTER	PARTNER GRANTS	PROJECT GRANTS	INNOVATIVE GRANTS	
May'09-Oct'09 <i>(disbursed)</i>	1	\$353,987	\$172,920	\$42,068	\$568,975
Nov'09-Apr'10 <i>(Estimate Expenditure)</i>	2	\$1,021,608	\$728,415	\$188,244	\$1,938,266
GRAND TOTAL		\$1,375,595	\$901,335	\$230,312	\$2,507,241

Appendix 5: Documents Produced this Reporting Period

The following reports and documents were produced during the reporting period May-October 2009:

Strategic Documents

- Program Operations Handbook (revision)

Contractual Documents to AusAID

- Annual Plan Year 2
- Monthly Reports (May-September 2009)
- Six-monthly Report (May-October 2009)
- Financial Irregularities Table (May-September 2009)
- Minutes of PCC Meeting 3

ACCESS Promotional Material

- ACCESS Phase II Bulletin (Edition 2)

Documents to Government

- Monthly Reports (May-September 2009) to district government
- Quarterly Reports to District and Provincial Government
- Grant Reports to MOHA (May-September 2009)

Technical Reports

- A Toolkit for Understanding and Using Strength Based Approaches in Development

Contributions to other ACCESS Reports

- MRG 2 Final Report

Appendix 6: PGAs Issued this Reporting Period

ACCESS Phase II Monthly Report - By Grant Type

Report Period: 1/05/2009 - 27/10/2009

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
<u>Partner Grant</u>				
<i>Proposals Received 1/05/2009 - 27/10/2009</i>				
18/08/2009	Inspirit Innovation Circle	Ma Rita Kismadi	Capacity Building Support in Assets Based Approaches	1,000,000,000
			Projects: 1	Total 1,000,000,000
<i>Proposals Approved 1/05/2009 - 27/10/2009</i>				
19/08/2009	Inspirit Innovation Circle	Ma Rita Kismadi	Capacity Building Support in Assets Based Approaches	1,000,000,000
			Projects: 1	Total 1,000,000,000
<i>Projects In Progress</i>				
11/02/2009	YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi)	Iko	Application of Civil Society Index for ACCESS Phase II	7,500,000,000
31/03/2009	Mitra Samya (Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi)	Purnama Sidhi	Strengthen NGOs/CSOs to Improve the Participation of the Community Towards Better Lokal Democratic Governance	3,400,000,000
21/08/2009	Inspirit Innovation Circle	Ma Rita Kismadi	Capacity Building Support in Assets Based Approaches	1,000,000,000
			Projects: 3	Total 11,900,000,000
<u>Project Grant</u>				
<i>Proposals Received 1/05/2009 - 27/10/2009</i>				
24/06/2009	Melayu Lestari (YAMUL) Yayasan	Hendriks Lourens Jonas	Assessment and Planning Activity Using Participatory Outcome Mapping Approach to Design a Program for Community Empowerment in Development Management as an Entry Point Towards Village Autonomy in Muna District	5,000,000
10/07/2009	Pengembangan Rakyat Indonesia Madani (PRIMA) Yayasan	Jafar	Improve the Participation of Citizens and Their Organisations in the Implementation of Basic Education in Buton District	894,055,000
16/07/2009	Karaeng Opu Yayasan	Supriadi Ukkas	Program to Improve the Quality of Public Services Through Community Participation in Lokal Good Governance	367,060,000
16/07/2009	Jalarambang Indonesia (Yajalindo) Yayasan	Husni Alam S.Sos	Program to Increase the Capacity of Citizens and Public Policy Institutions to Support Lokal Development that is Participatory, Transparent and Accountable at Bantaeng District	634,800,000
16/07/2009	Aliansi Masyarakat Sipil Turatea (AMST)	Ahmad Faisal	Jeneponto Green and Clean	331,002,500
16/07/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (Jaring Mas)	Amri. S.Sos	Program of Community Economic Empowerment Through Management of Village Owned Businesses (BUMDes) that is Democratic, Transparent, Participatory and Promotes Citizen	367,355,000
16/07/2009	Aliansi KSM (Koperasi Tani Assamaturu)	Rosdiana, SH	Productive Economic Businesses Based on Lokal Potential	271,775,000

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value	
16/07/2009	Mitra Turatea-Yayasan	Abdul Rachmad	Strengthen the Capacity of the Poor and Women in Planning and Budgetting that is Transparent, Accountable, Participatory and Inclusive	659,135,000	
20/07/2009	Le-SA Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (LESA)	Saiful Muslim, S.pt	Accelerate Development Through Strengthening Lokal Institutions and Advocating on Basic Rights in Central Lombok 2009-2012	800,167,500	
20/07/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Mas'ud S.Ag	Community and Lokal Organisation Strengthening Program to Improve Lokal Democratic	775,652,500	
29/07/2009	ASPUK (Asosiasi Perempuan Usaha Kecil Wilayah Nusa Tenggara)	Ririn Hayudiani	Strengthening the Capacity of Women's Micro Credit Groups by Developing a Sustainable Cooperative Network that Promotes Lokal Democratic Governance in Central Lombok	723,609,000	
3/08/2009	Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR-NTT)	Patje Saubaki, SH	Seminar to Create the Space and Opportunity for Democratic Lokal Governance in Kupang and TTS Districts	35,780,000	
8/08/2009	LSM Lembayung - Asosiasi Mareje Bonga	Lalu Bakri	Social Assessment Using Outcome Mapping for Developing an Action Plan for Community Forestry Management in Mareje Bonga That is Democratic, Socially Just and Sustainable	10,000,000	
10/08/2009	Lembaga Studi Perubahan Sosial dan Pengembangan Masyarakat (STIMULANT Institute)	Stepanus	Empowering the Public Who are Not Given a Voice Through Engagement with Lokal Institutions	716,005,000	
10/08/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat (Solidaritas Perempuan Mataram)	Suhaimi	Optimising the Role of the Community Centre in Promoting Citizen's Basic Rights and Improved Service Delivery in West Lombok	749,915,000	
16/08/2009	Bahtera Yayasan	Stefanus H. Segu	Village Planning and Budgeting as a Starting Point for Equitable Village Autonomy Based on the Principles of Lokal Democratic Governance	1,972,769,250	
18/08/2009	Satu Visi Yayasan	Deby R. Kasuatu	Strengthen Lokal Potential for Poverty Alleviation of Village Communities in West Sumba	899,546,250	
4/09/2009	Cendana Mekar Yayasan	Selyn Sedo	Participatory, Accountable, Inclusive and Asset-based Village Planning and Budgeting	1,380,985,000	
14/09/2009	Yayasan Goa Center (YGC)	Darmawan	Appreciative District Meeting in Gowa and Takalar Districts in Preparation for DCEP	197,380,000	
2/10/2009	Perkumpulan Serabut (Sekolah Rakyat Butuni)	M. Abdi Hayat H	Appreciative Meeting for Bau-Bau City	0	
6/10/2009	Rumah Perempuan	Welhelmintje S.L.Sinlaeloe	Appreciative Meeting (DCEP workshop) for Kupang District	85,555,000	
7/10/2009	Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat "Bangun Daya" (LP2DER Bangun Daya)	Ir Bambang Yusuf	Appreciative District Meeting (DCEP workshop) to Develop the Vision and Agenda for Bima District	77,870,000	
8/10/2009	Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL)	Zulkarnain S.Sos	DCEP Workshop to Develop a Vision and Agenda for Actors in Dompu District Aimed at Improving Lokal Democratic Governance	86,085,000	
			Projects: 23	Total	12,041,502,000
Proposals Approved 1/05/2009 - 27/10/2009					
4/05/2009	Berugak Dese	Naspiah	Action Planning Using an Outcome Mapping Approach for Strengthening the Capacity of Health Cader in Promoting Good Health Practices in Five Villages in Kopang Subdistrict	10,000,000	
20/07/2009	Melayu Lestari (YAMUL) Yayasan	Hendriks Lourens Jonas	Assessment and Planning Activity Using Participatory Outcome Mapping Approach to Design a Program for Community Empowerment in Development Management as an Entry Point Towards	5,000,000	

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
31/07/2009	Mitra Turatea-Yayasan	Abdul Rachmad	Village Autonomy in Muna District Strengthen the Capacity of the Poor and Women in Planning and Budgeting that is Transparent, Accountable, Participatory and Inclusive	659,135,000
31/07/2009	Karaeng Opu Yayasan	Supriadi Ukkas	Program to Improve the Quality of Public Services Through Community Participation in Lokal Good Governance	367,060,000
11/08/2009	LSM Lembayung - Asosiasi Mareje Bonga	Lalu Bakri	Social Assessment Using Outcome Mapping for Developing an Action Plan for Community Forestry Management in Mareje Bonga That is Democratic, Socially Just and Sustainable	10,000,000
18/08/2009	Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR-NTT)	Patje Saubaki, SH	Seminar to Create the Space and Opportunity for Democratic Lokal Governance in Kupang and TTS Districts	35,780,000
20/08/2009	Pengembangan Rakyat Indonesia Madani (PRIMA) Yayasan	Jafar	Improve the Participation of Citizens and Their Organisations in the Implementation of Basic Education in Buton District	894,055,000
24/08/2009	Satu Visi Yayasan	Deby R. Kasuatu	Strengthen Lokal Potential for Poverty Alleviation of Village Communities in West Sumba	899,546,250
27/08/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (Jaring Mas)	Amri. S.Sos	Program of Community Economic Empowerment Through Management of Village Owned Businesses (BUMDes) that is Democratic, Transparent, Participatory and Promotes Citizen	367,355,000
27/08/2009	Jalarambang Indonesia (Yajalindo) Yayasan	Husni Alam S.Sos	Program to Increase the Capacity of Citizens and Public Policy Institutions to Support Lokal Development that is Participatory, Transparent and Accountable at Bantaeng District	634,800,000
28/08/2009	Le-SA Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (LESA)	Saiful Muslim, S.pt	Accelerate Development Through Strengthening Lokal Institutions and Advocating on Basic Rights in Central Lombok 2009-2012	800,167,500
31/08/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Mas'ud S.Ag	Community and Lokal Organisation Strengthening Program to Improve Lokal Democratic	775,652,500
31/08/2009	Aliansi Masyarakat Sipil Turatea (AMST)	Ahmad Faisal	Jenepono Green and Clean	331,002,500
31/08/2009	Aliansi KSM (Koperasi Tani Assamaturu)	Rosdiana, SH	Productive Economic Businesses Based on Lokal Potential	271,775,000
3/09/2009	ASPUK (Asosiasi Perempuan Usaha Kecil Wilayah Nusa Tenggara)	Ririn Hayudiani	Strengthening the Capacity of Women's Micro Credit Groups by Developing a Sustainable Cooperative Network that Promotes Lokal Democratic Governance in Central Lombok	723,609,000
4/09/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat (Solidaritas Perempuan Mataram)	Suhaimi	Optimising the Role of the Community Centre in Promoting Citizen's Basic Rights and Improved Service Delivery in West Lombok	749,915,000
14/09/2009	Cendana Mekar Yayasan	Selyn Sedo	Participatory, Accountable, Inclusive and Asset-based Village Planning and Budgeting	1,380,985,000
14/09/2009	Lembaga Studi Perubahan Sosial dan Pengembangan Masyarakat (STIMULANT Institute)	Stepanus	Empowering the Public Who are Not Given a Voice Through Engagement with Lokal Institutions	716,005,000
29/09/2009	Yayasan Goa Center (YGC)	Darmawan	Appreciative District Meeting in Gowa and Takalar Districts in Preparation for DCEP	197,380,000
9/10/2009	Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL)	Zulkarnain S.Sos	DCEP Workshop to Develop a Vision and Agenda for Actors in Dompu District Aimed at Improving Lokal Democratic Governance	86,085,000
13/10/2009	Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat "Bangun Daya" (LP2DER Bangun Daya)	Ir Bambang Yusuf	Appreciative District Meeting (DCEP workshop) to Develop the Vision and Agenda for Bima	77,870,000
15/10/2009	Rumah Perempuan	Welhelmintje S.L.Sinlaeloe	Appreciative Meeting (DCEP workshop) for Kupang District	85,555,000
16/10/2009	Bahtera Yayasan	Stefanus H. Segu	Village Planning and Budgeting as a Starting Point for Equitable Village Autonomy Based on the Principles of Lokal Democratic Governance	1,972,769,250

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Projects: 23	Total	12,051,502,000 Value
Projects In Progress						
5/11/2008	ACCESS	Sartono	Provincial Coordinator Capacity Building Support for South Sulawesi			60,000,000
5/11/2008	ACCESS	Ferdinandus Rondong	Provincial Coordinator Capacity Building Support for NTT (Sumba)			30,000,000
5/11/2008	ACCESS	Dian Anggraeni	Provincial Coordinator Capacity Building Support for NTB (Lombok)			60,000,000
5/11/2008	ACCESS	Johnly E.P. Poerba	Provincial Coordinator Capacity Building Support for South East Sulawesi			30,000,000
20/04/2009	ACCESS	Toha Arifin	Provincial Coordinator Capacity Building Support for NTB (Sumbawa)			30,000,000
20/04/2009	ACCESS	Silvester Fallo	Provincial Coordinator Capacity Building Support for NTT (Timor)			30,000,000
22/07/2009	Melayu Lestari (YAMUL) Yayasan	Hendriks Lourens Jonas	Assessment and Planning Activity Using Participatory Outcome Mapping Approach to Design a Program for Community Empowerment in Development Management as an Entry Point Towards Village Autonomy in Muna District			5,000,000
18/08/2009	Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR-NTT)	Patje Saubaki, SH	Seminar to Create the Space and Opportunity for Democratic Lokal Governance in Kupang and TTS Districts			35,780,000
18/08/2009	LSM Lembayung - Asosiasi Mareje Bonga	Lalu Bakri	Social Assessment Using Outcome Mapping for Developing an Action Plan for Community Forestry Management in Mareje Bonga That is Democratic, Socially Just and Sustainable			10,000,000
1/09/2009	Aliansi Masyarakat Sipil Turatea (AMST)	Ahmad Faisal	Jeneponto Green and Clean			331,002,500
1/09/2009	Aliansi KSM (Koperasi Tani Assamaturu)	Rosdiana, SH	Productive Economic Businesses Based on Lokal Potential			271,775,000
1/09/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (Jaring Mas)	Amri. S.Sos	Program of Community Economic Empowerment Through Management of Village Owned Businesses (BUMDes) that is Democratic, Transparent, Participatory and Promotes Citizen			367,355,000
2/09/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Mas'ud S.Ag	Community and Lokal Organisation Strengthening Program to Improve Lokal Democratic			775,652,500
2/09/2009	Le-SA Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (LESA)	Saiful Muslim, S.pt	Accelerate Development Through Strengthening Lokal Institutions and Advocating on Basic Rights in Central Lombok 2009-2012			800,167,500
2/09/2009	Karaeng Opu Yayasan	Supriadi Ukkas	Program to Improve the Quality of Public Services Through Community Participation in Lokal Good Governance			367,060,000
7/09/2009	Jalarambang Indonesia (Yajalindo) Yayasan	Husni Alam S.Sos	Program to Increase the Capacity of Citizens and Public Policy Institutions to Support Lokal Development that is Participatory, Transparent and Accountable at Bantaeng District			634,800,000
7/09/2009	Mitra Turatea-Yayasan	Abdul Rachmad	Strengthen the Capacity of the Poor and Women in Planning and Budgeting that is Transparent, Accountable, Participatory and Inclusive			659,135,000
14/09/2009	Cendana Mekar Yayasan	Selyn Sedo	Participatory, Accountable, Inclusive and Asset-based Village Planning and Budgeting			1,380,985,000
28/09/2009	Lembaga Studi Perubahan Sosial dan Pengembangan Masyarakat (STIMULANT Institute)	Stepanus	Empowering the Public Who are Not Given a Voice Through Engagement with Lokal Institutions			716,005,000
1/10/2009	Yayasan Goa Center (YGC)	Darmawan	Appreciative District Meeting in Gowa and Takalar Districts in Preparation for DCEP			197,380,000
13/10/2009	Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat "Bangun Daya" (LP2DER Bangun Daya)	Ir Bambang Yusuf	Appreciative District Meeting (DCEP workshop) to Develop the Vision and Agenda for Bima			77,870,000
13/10/2009	Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL)	Zulkarnain S.Sos	DCEP Workshop to Develop a Vision and Agenda for Actors in Dompu District Aimed at Improving Lokal Democratic Governance			86,085,000
				Projects: 22	Total	6,956,052,500

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
Project Completed 1/05/2009 - 27/10/2009				
29/06/2009	Bahtera Yayasan	Martha Rambu Bangi	District Citizen Engagement Plan (DCEP) Workshop in Sumba Barat	105,370,000
2/06/2009	Cendana Mekar Yayasan	Ida Rambu Podu	District Citizen Engagement Plan (DCEP) Workshop in Sumba Timur	108,665,000
1/05/2009	Inspirit Innovation Circle	Dani Wahyu Munggoro	Learning to Learn: Creating a Powertool for Effective, Meaningful and Continuous Organizational Learning	30,700,000
29/06/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Mas'ud	Application of Outcome Mapping for Planning and Assessment Process to Develop a Program that will Strengthen the Capacity of Community Organizations and Lokal Facilitators	10,605,000
2/06/2009	Aliansi KSM (Koperasi Tani Assamaturu)	Saminda	Assessment and Development of District Agenda on Improving Productive Economic Businesses based on Lokal Assets	10,200,000
29/06/2009	Pengembangan Rakyat Indonesia Madani (PRIMA) Yayasan	Jafar	Application of Outcome Mapping in the Planning and Assessment Process for Developing a Program on Increasing Access of Marginal Groups to Basic Education	4,600,000
2/06/2009	Cendana Mekar Yayasan	Ida Rambu Podu, SH	Social Assessment to Develop a Participatory Action Plan for Village Planning and Budgeting	12,595,000
2/06/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (Jaring Mas)	Ramlan	Assessment and Planning for District Action Plan on Village Owned Businesses	10,100,000
2/06/2009	Mitra Turatea-Yayasan	Abdul Rakhmad	Planning and Assessment to Develop an Action Plan on Strengthening the Capacity of the Poor and Women in Planning and Budgeting	19,430,000
2/06/2009	Jalarambang Indonesia (Yajalindo)	Asriyudi	Assessment for Developing Action Plan for Improving the Capacity of Citizens and Public Service Institutions to Support Participatory, Transparent and Accountable Lokal Development	10,205,000
2/06/2009	Aliansi Masyarakat Sipil Turatea (AMST)	Ahmad Faisal	Assessment and Development of District Action Plan for Jenepono Go Green	9,625,000
29/06/2009	Satu Visi Yayasan	Deby Rambu Kasuatu	Social Assessment to Develop an Action Plan for a Program to Develop and Strengthen Community Organisations	5,000,000
31/07/2009	Bahtera Yayasan	Stefanus Segu	Social Assessment for Developing the Action Plan on Participatory Planning and Budgeting	11,535,000
29/06/2009	Lembaga Studi Perubahan Sosial dan Pengembangan Masyarakat (STIMULANT Institute)	Stepanus	Needs Assessment and Social Mapping in Preparation for Action Plan on Public Speaking	4,980,000
29/06/2009	Alam Lestari (YAL) Yayasan	Arie Haudima	Social Assessment for Action Plan to Strengthen Village Economy Based on Lokal Assets and Sustainability	5,000,000
2/06/2009	Karaeng Opu Yayasan	Supriadi Ukas	Assessment for Developing the District Action Plan for Quality Public Services	10,120,000
31/07/2009	PAKTA Sumba Yayasan	Amos Siwa Wunu, Sp	Social Assessment for Development of Action Plan on Sustainable Natural Resource Management Based on the Women and the Poor	5,000,000
29/06/2009	Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI)	Rahmat Sabani	Social Assessment for Developing an Action Plan for CSOs in Advocating for Community Based Resource Management using an Outcome Mapping Approach	10,000,000
31/07/2009	Pelintas Buton	Nasrun	Assessment and Planning using Outcome Mapping for Designing a Village Community Empowerment Program as an Entry Point for Village Autonomy	4,995,000
31/07/2009	Bina Potensi Desa (Sintesa) Yayasan	Syukri Rauf	Participatory Assessment for the Development of Action Plan for Village Economic Units and sustainable Natural Resource Management in 12 Districts in Buton	4,978,000
28/05/2009	Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat "Bangun Daya" (LP2DER Bangun Daya)	Bambang Yusuf	Seminar and Workshop on Creating Room and Providing Opportunity for LDG in Dompu and Bima	26,575,000
31/07/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok	Yane Rachma Bhirawati	Using Outcome Mapping in Assessment and Planning to Prepare an Action Plan to Strengthen the	10,000,000

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
29/06/2009	Barat (Solidaritas Perempuan Mataram) Le-SA Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (LESA)	Saeiful Muslim Sp.t	Role of Community Centres in Advocating for Better Public Services Use of Outcome Mapping in Assessment and Planning for Program to Accelerate Development Through Strengthening Lokal Institutions and Advocacy for Basic Rights	5,000,000
31/07/2009	ASPUK (Asosiasi Perempuan Usaha Kecil Wilayah Nusa Tenggara)	Masitah	Use of Outcome Mapping for Assessment and Planning to Prepare Action Plan for Strengthening the Organisational Capacity of Women's Small Businesses	10,000,000
12/10/2009	Berugak Dese	Naspiah	Action Planning Using an Outcome Mapping Approach for Strengthening the Capacity of Health Cader in Promoting Good Health Practices in Five Villages in Kopang Subdistrict	10,000,000
			Projects: 25	Total Value: 455,278,000

Innovative Project

Proposals Received 1/05/2009 - 27/10/2009

22/05/2009	Santiri Foundation	Cahayani	Political Debate for School Children - To Celebrate a Brighter Indonesia and Competitive NTB	34,625,000
18/06/2009	Sloka Institute	Anton Muhajir	Development of the ACCESS Bulletin as a Tool for Learning and Sharing Knowledge to Scale-up Program Impacts	173,675,000
24/08/2009	Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan)	Yanti Muchtar	Assessment of Capacity Building Interventions Undertaken by ACCESS in Women's Leadership in South Sulawesi and NTB	201,685,000
24/08/2009	Veco Indonesia	Steff Deprez	Outcome Mapping Resource KIT	40,000,000
9/10/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Dian Aryani, SP	Alternative Child and Adult Education - an Alternative Critical Education	21,780,000
			Projects: 5	Total 471,765,000

Proposals Approved 1/05/2009 - 27/10/2009

1/06/2009	Santiri Foundation	Cahayani	Political Debate for School Children - To Celebrate a Brighter Indonesia and Competitive NTB	34,625,000
28/07/2009	Sloka Institute	Anton Muhajir	Development of the ACCESS Bulletin as a Tool for Learning and Sharing Knowledge to Scale-up Program Impacts	173,675,000
26/08/2009	Veco Indonesia	Steff Deprez	Outcome Mapping Resource KIT	40,000,000
18/09/2009	Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan)	Yanti Muchtar	Assessment of Capacity Building Interventions Undertaken by ACCESS in Women's Leadership in South Sulawesi and NTB	201,685,000
13/10/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Dian Aryani, SP	Alternative Child and Adult Education - an Alternative Critical Education	21,780,000
			Projects: 5	Total 471,765,000

Projects In Progress

28/07/2009	Sloka Institute	Anton Muhajir	Development of the ACCESS Bulletin as a Tool for Learning and Sharing Knowledge to Scale-up Program Impacts	173,675,000
1/09/2009	Veco Indonesia	Steff Deprez	Outcome Mapping Resource KIT	40,000,000
18/09/2009	Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan)	Yanti Muchtar	Assessment of Capacity Building Interventions Undertaken by ACCESS in Women's Leadership in South Sulawesi and NTB	201,685,000
			Projects: 3	Total 415,360,000

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
<i>Project Completed 1/05/2009 - 27/10/2009</i>				
25/07/2009	Santiri Foundation	Cahayani	Political Debate for School Children - To Celebrate a Brighter Indonesia and Competitive NTB	34,625,000
			Projects: 1	Total Value:
				34,625,000